



# RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD

2018 - 2023



PEMERINTAH KOTA BEKASI

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bekasi.....	6
2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD Kota Bekasi.....	10
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.....	16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.....	20
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.....	24
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	26
3.3 Penentuan Isu-isu Strategis.....	27
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1 Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Bekasi.....	29
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD.....	32
5.2 Kebijakan Sekretariat DPRD.....	33
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>	<b>38</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b>	<b>75</b>
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>75</b>

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA atas penyelesaian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023 sebagai penjabaran dari RPJM salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi terhadap Konsekuensi logis bagi setiap Aparatur Pemerintah, di dalam kelembagaan senantiasa mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya sebagai tolak ukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, khususnya pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu waktu 5 (lima) tahunan dengan memperhitungkan dan mengeksplorasi berbagai faktor internal dan eksternal instansi Pemerintah guna menetapkan arahan pengembangan /perjalanan suatu instansi Pemerintahan, tahapan serta strategis ini kami sadari masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian kiranya dapat dijadikan pedoman khusus bagi Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam menetapkan skala prioritas program/kegiatan guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas suatu program/kegiatan terutama dibidang Administrasi Umum pemerintahan.

Semoga dengan tersusunnya Perencanaan Strategis yang jelas dan sinergis, diharapkan dimasa mendatang Sekretariat DPRD Kota Bekasi dapat lebih maju mengantisipasi dan adaptif terhadap berbagai perubahan dan perkembangan yang sangat mempengaruhi kondisi internal maupun eksternal organisasi dalam mewujudkan visi dan misi Instansi Pemerintah.

**Sekretaris DPRD Kota Bekasi**

**Dr. H. MOH. RIDWAN, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620103 198503 1 010

### 1.1. Latar Belakang

**S**ekretariat DPRD menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan pada masa kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih. Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 berisi penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah tahun 2018-2023 dituangkan ke dalam kebijakan, strategi, dan program perencanaan pembangunan yang mengacu kepada RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023.

Renstra merupakan pedoman bagi penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahunan Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi periode 2018-2023 menyajikan agenda utama Sekretariat DPRD Kota Bekasi untuk mengantisipasi masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani pada periode 2013-2018 yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke depan sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis, baik lingkungan strategis di tingkat regional, nasional maupun global, serta perubahan iklim yang terjadi akhir-akhir ini.

Renstra disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi.

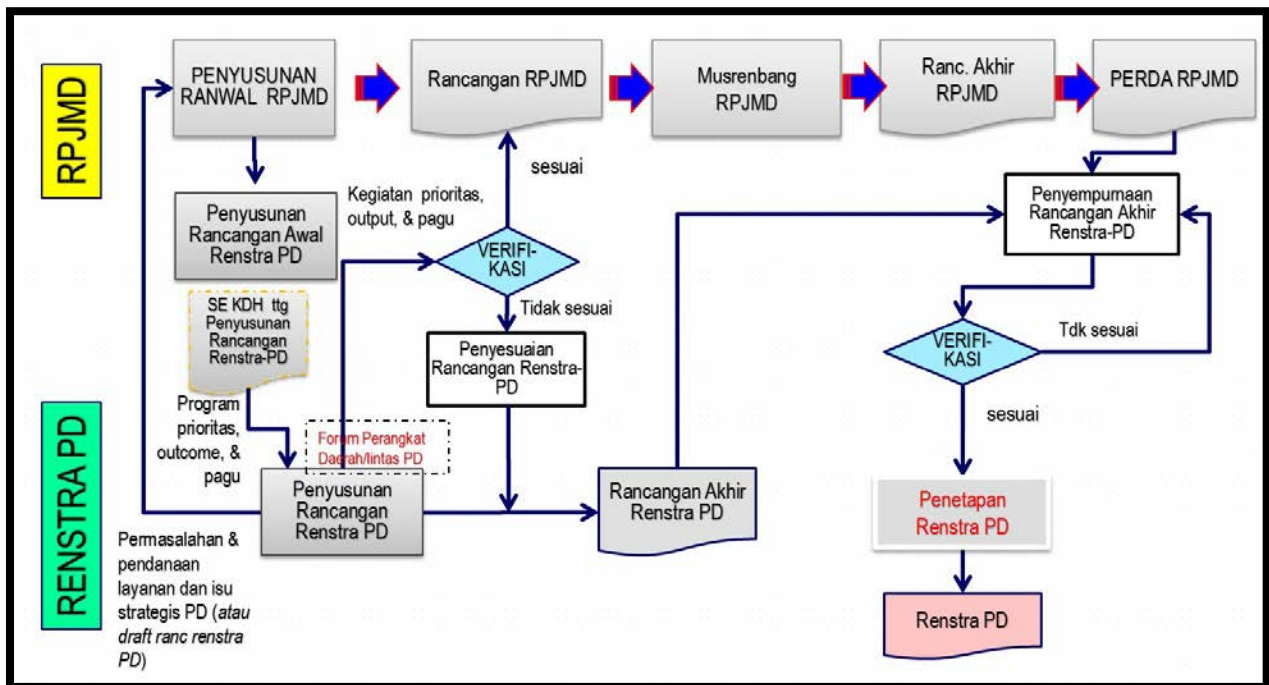
Sebagai dokumen perencanaan formal suatu instansi pemerintah, Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi 2018-2023 disusun melalui proses partisipatif, teknokratis dan politis, yang berpedoman pada; (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan; (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; (3) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (4) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan (6) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang RPJPD Kota Bekasi Tahun 2005-2025.

Proses penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2018–2023 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2013- 2018 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.

**Gambar 1.1.**

**KETERKAITAN TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD dan RENSTRA PD**

(Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)



Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi menyajikan agenda utama untuk kelancaran tugas pelayanan kepada DPRD yang belum sepenuhnya tertangani pada periode 2008-2013, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Oleh karena itu, Renstra tersebut minimal harus mencakup kebijakan strategi dan program pelayanan kepada DPRD dan dapat mensinergikan hubungan antar anggota DPRD, hubungan DPRD dengan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi dan hubungan DPRD dengan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam rangka melahirkan kebijakan politik yang ditujukan sebesar-besarnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat dengan membangun Daerah Kota Bekasi melalui pengembangan potensi spesifik lokal yang meliputi sumber daya alamaga.

Berkaitan dengan hirarki organisasi, Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi merupakan penjabaran dari RPJPD Kota Bekasi Tahun 2005-2025, RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 serta memperhatikan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Rencana Strategis Sekretariat DPRD merupakan salah satu dokumen teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis dari RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikasi rencana program lima tahunan meliputi program internal

maupun eksternal, yaitu yang merupakan program Perangkat Daerah (PD) Sekretariat DPRD, program lintas PD, dan program lintas wilayah.

Memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga, Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi 2018-2023 disusun sebagai kelanjutan dari Renstra periode 2013-2018. Pencapaian produk-produk perencanaan dan hasil-hasil kajian strategik pembangunan, restrukturisasi organisasi, pembinaan Sumber Daya Aparatur, penyempurnaan manajemen selama periode 2008-2013 merupakan modal bagi perencanaan program pembangunan daerah 2018-2023.

## 1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi;
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
17. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 58 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra) di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi disusun sebagai acuan penyusunan Renja dan RKA Sekretariat DPRD serta sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

#### **1.3.2. Tujuan**

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Sekretariat DPRD khususnya sebagai fungsi penunjang lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat.
- b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 memuat visi dan misi Wali Kota - Wakil Wali Kota Bekasi periode 2018-2023, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **Bab I           Pendahuluan**

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah, Memuat

penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

## **Bab II      Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

## **Bab III     Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota, RTRW, dan KLHS.

## **Bab IV     Tujuan dan Sasaran**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

## **Bab V      Strategi Dan Arah Kebijakan**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

## **Bab VI     Rencana Program Dan Kegiatan, Serta Pendanaan**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

## **Bab VII    Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **Bab VIII   Penutup**

Menjelaskan periodisasi renstra Sekretariat DPRD Tahun 2018-2023.



## BAB II

# Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

**S**ekretariat DPRD Kota Bekasi merupakan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Wali Kota Bekasi sebagai fungsi penunjang lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 seri D).

Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi berkedudukan sebagai unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kota, yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD Kota Bekasi mempunyai fungsi:

- 1) Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan PD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sekretariat DPRD;
- 2) Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya
- 3) Pengelolaan administrasi umum yg meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan dinas.

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bekasi terdiri atas:

I. Sekretaris DPRD, membawahkan:

- a. Bagian Administrasi Umum, yang terdiri dari:
  1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan;
  3. Sub Bagian Humas dan Publikasi.
- b. Bagian Perencanaan dan Keuangan, yang terdiri dari:
  1. Sub Bagian Perencanaan;
  2. Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan;
  3. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.
- c. Bagian Legislasi, Persidangan dan Protokol, yang terdiri dari:
  1. Sub Bagian Perundang-undangan;
  2. Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Protokol.
- d. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan, yang terdiri dari:
  1. Sub Bagian Fasilitas Penganggaran;
  2. Sub Bagian Fasilitas Pengawasan.

## II. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai visi dan misi Sekretariat DPRD. Untuk menyelenggarakan tugas, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Sekretariat DPRD sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup Sekretariat DPRD;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Pembinaan administrasi perkantoran;
- e. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD kota;
- f. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kota;
- g. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan SKPD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Sekretariat DPRD;
- h. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Sekretariat DPRD;
- i. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- j. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Sekretariat DPRD sesuai ketentuan yang berlaku;
- k. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Sekretariat DPRD kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Sekretariat DPRD sesuai ketentuan yang berlaku;
- l. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Pokok Bagian Administrasi Umum adalah membantu Sekretaris DPRD melaksanakan pembinaan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administratif yang meliputi urusan tata usaha dan kepegawaian, perlengkapan dan pemeliharaan serta humas dan publikasi untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Bagian Administrasi Umum Membawahi Sub Bagian:

1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perlengkapan dan Pemeliharaan;
3. Sub Bagian Humas dan Publikasi.

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam memberikan pelayanan meliputi urusan perencanaan program, teknis penyelenggaraan anggaran dan perbendaharaan serta verifikasi dan pelaporan.

Bagian Perencanaan dan Keuangan membawahi Sub Bagian yaitu:

1. Sub Bagian Perencanaan;
2. Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan;
3. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan.

Bagian Legislasi, Persidangan dan Protokol mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melaksanakan pengelolaan legislasi, persidangan dan protokol yang meliputi urusan perundang-undangan, persidangan, risalah dan protokol.

Bagian Legislasi, Persidangan dan Protokol, membawahkan:

1. Sub Bagian Perundang-undangan;
2. Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Protokol.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam memfasilitasi DPRD melaksanakan fungsi fasilitasi penyelenggaraan anggaran dan pengawasan meliputi rencana fasilitasi anggaran dan fasilitasi pengawasan.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawahkan:

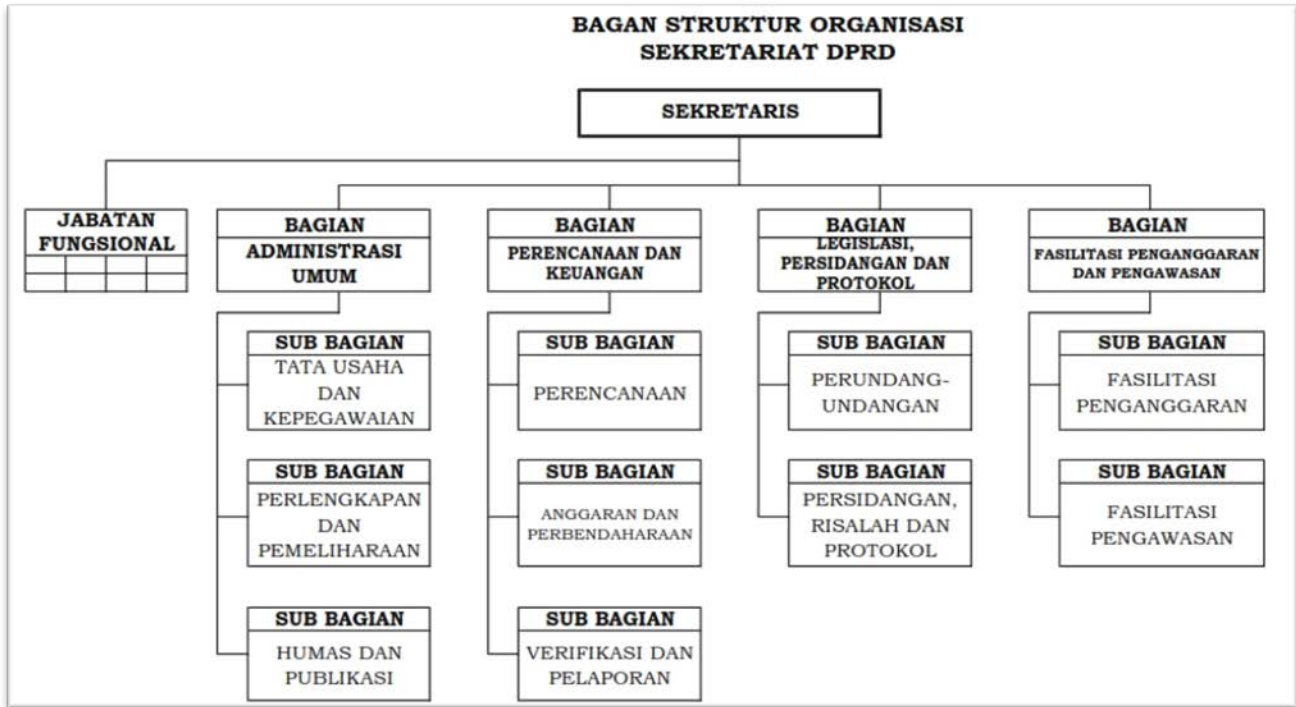
1. Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;
2. Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sebagaimana Peraturan Perundang-undangan.

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD secara lengkap tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Adapun susunan organisasi Sekretariat DPRD berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi seperti pada gambar 1.

**Gambar 1. Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Kota Bekasi**



Sumber: Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 62 Tahun 2016

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD memiliki Standar Operasional dan Prosedur (SOP) yang ditetapkan melalui SK Sekretariat DPRD, seperti pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1. Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Sekretariat DPRD**

Implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) bahwa setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan pelayanan organisasi diharuskan menyusun Standar Operasional Prosedur.

Sekretariat DPRD Kota Bekasi menyusun SOP berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kota Bekasi Nomor 050/990.7/perc. Tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bekasi.

NO	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
1	RENSTRA
2	LAKIP
3	Penetapan Kinerja (TAPKIN)
4	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)
5	Pemeliharaan Jaringan SITEL dan Kerjasama Internasional
6	Penerbitan Bulletin Swara DPRD dan Selayang Pandang
7	Fasilitasi Penerimaan Tamu Pimpinan DPRD
8	Pengajuan SPM Gaji dan Tunjangan
9	Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Ganti Uang (GU)
10	Penyusunan Raperda Inisiatif Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Kegiatan
11	Pengajuan Anggaran BTL DPRD dan Sekretariat DPRD
12	Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Tambah Uang (TU)
13	Peningkatan Kapasitas DPRD Kota Bekasi

NO	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
14	Pendidikan dan Pelatihan Formal
15	Penyelenggaraan ASDEKSI dan ADEKSI
16	Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi
17	Sub. Bagian Verifikasi dan Pelaporan Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi
18	Pengajuan Anggaran Penyusunan Laporan Keuangan
19	Pengajuan Surat Permintaan Membayar (SPM) Ganti Uang (GU) Tambah Uang (TU)/ Langsung (LS)
20	Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Langsung (LS) Dokumen
21	Penyelenggaraan Rapat Pimpinan (Rapim)
22	Penyelenggaraan Rapat Badan Musyawarah
23	Penyelenggaraan Rapat Paripurna
24	Pendokumentasian dan Penghimpunan Produk-Produk Hukum
25	Pelayanan Produk-Produk Hukum
26	Pengelolaan Buku Perpustakaan
27	Pengadaan Buku Perpustakaan
28	Pendaftaran Anggota Perpustakaan
29	Penelusuran Buku Perpustakaan
30	Peminjaman Buku Perpustakaan
31	Pengembalian Buku Perpustakaan
32	Perpanjangan Buku Perpustakaan
33	Surat Masuk
34	Surat Keluar
35	Daftar Urut Kepangkatan
36	Sistem Kinerja Pegawai
37	Kenaikan Pangkat Pegawai
38	Kenaikan Gaji Berkala
39	SKUMPTK
40	Cuti Pegawai Bekerja
41	Pengurusan Administrasi dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional
42	Perawatan AC
43	Pengawasan Kebersihan Ruang Kerja dan Halaman Kantor
44	Pengawasan Bangunan Gedung kantor
45	Perawatan Perbaikan dan Penggantian Instalasi Listrik Beserta Komponen Lainnya
46	Perbaikan/Perawatan Peralatan Kantor
47	Pelaporan Kondisi (Kerusakan Gedung)
48	Penyelenggaraan Kegiatan Badan Anggaran DPRD
49	Kegiatan Reses DPRD
50	Pembahasan Raperda
51	Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD
52	Penyusunan Program Legislasi Daerah (PROLEGDA)
53	Fasilitas Penerimaan Tamu Kunjungan Kerja DPRD

## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### A. Kondisi Kepegawaian

Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut didukung oleh 189 orang personil yang terdiri 83 orang laki-laki dan 84 orang perempuan. Secara kuantitas aparatur Sekretariat DPRD Kota Bekasi sudah cukup memadai, namun secara kualitas masih diperlukan beberapa orang yang mempunyai keahlian khusus dan kualifikasi pendidikan seperti sarjana informatika, sarjana ekonomi, sarjana manajemen strategis, Sarjana Hukum. Tabel 2.2 disampaikan Sumber Daya Sekretariat DPRD Kota Bekasi berdasarkan status kepegawaian, jenis kelamin, golongan dan pendidikan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bekasi didukung dengan sumber daya manusia yaitu sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) orang, terdiri dari:

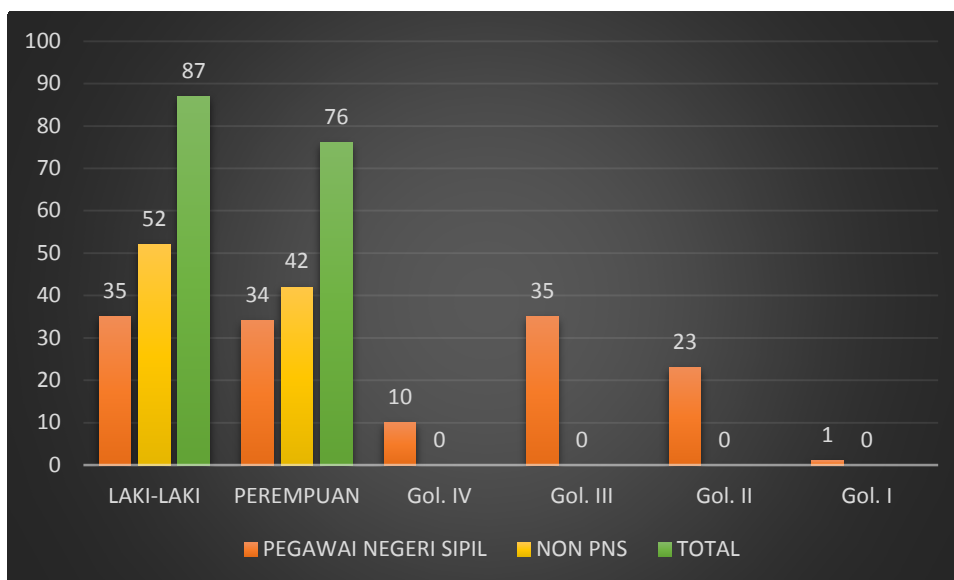
**Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Bagian**

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Sekretaris DPRD Kota Bekasi	1
2	Kabag Administrasi Umum	1
3	Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian	1
4	KasubagPerlengkapan dan Pemeliharaan	1
5	Kasubag Humas dan Publikasi	1
6	Kabag Legislasi, Persidangan dan Protokol	1
7	Kasubag Perundang-undangan	1
8	Kasubag Persidangan, Risalah dan protokol	1
9	Kabag Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan	1
10	Kasubag Fasilitas	1
11	Kasubag Produk Hukum	1
12	Kasubag Dokumentasi Hukum dan Perpustakaan	1
13	Kabag Keuangan	1
14	Kasubag Anggaran dan Perbendaharaan dan	1
15	Kasubag Verifikasi dan Pelaporan.	1
16	PNS (Pelaksana staff perbagian )	57
17	Non PNS (Pelaksana Staaf Perbagian)	91
	Total Keseluruhan	<b>163</b>

Sumber:Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian 2018

Pegawai Sekretariat DPRD berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 87 orang laki-laki dan 76 orang perempuan seperti tercantum dalam grafik 1.

**Grafik 1 Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan**

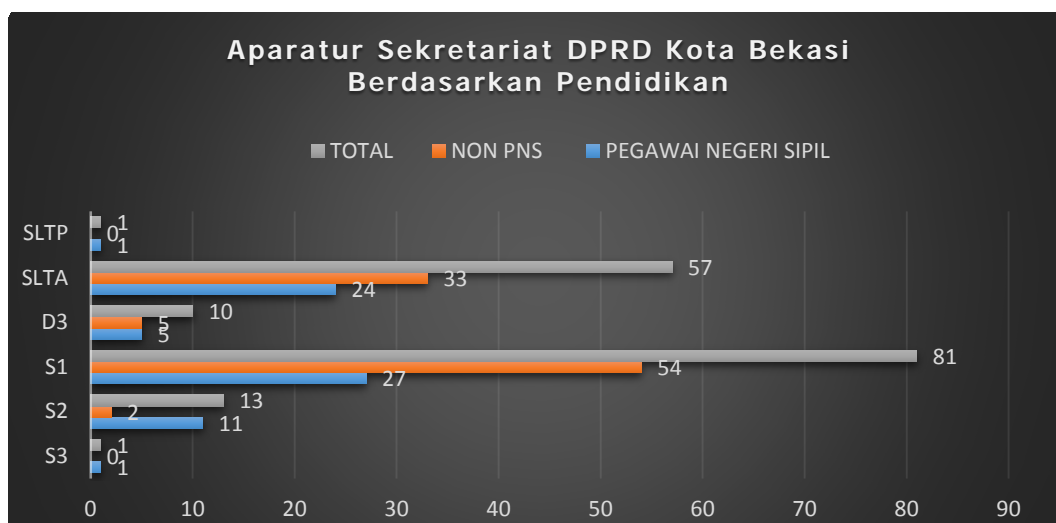


Sumber: Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian 2018

Dari 163 orang pegawai, 69 orang PNS dan 94 Non PNS, PNS berdasarkan golongan di Sekretariat DPRD terdapat 10 orang golongan IV, 35 orang golongan III, serta 23 orang golongan II dan 1 orang golongan I, seperti terlihat pada grafik 1.

Tingkat pendidikan Pegawai baik PNS maupun Non PNS di Sekretariat DPRD hampir sebagian besar lulusan S1 dengan jumlah 81 orang dengan rincian 27 orang PNS dan 54 orang non PNS, lulusan S2 berjumlah 13 orang PNS dan 2 orang non PNS, D3 berjumlah 10 orang dengan rincian masing-masing 5 orang untuk PNS dan Non PNS. Lulusan SLTA masih relatif banyak dengan jumlah 57 orang terdiri dari 24 orang PNS dan 33 orang non PNS. Dan masih terdapat lulusan SLTP terdapat 1 orang di PNS, hal ini bisa dilihat pada grafik 1, sebagai berikut:

**Grafik 2 Jumlah Pegawai Sekretariat DPRD Kota Bekasi Berdasarkan Pendidikan**



Sumber: Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian 2018

Untuk menambah wawasan dalam menunjang tupoksi setiap PNS diharuskan mengikuti diklat baik formal maupun informal, begitu halnya pegawai Sekretariat DPRD. Beberapa pegawai telah mengikuti Diklat Pim II, III, dan IV serta diklat lainnya. Hal ini terlihat pada tabel 2.3.

**Tabel 2.3. Kondisi Kepegawaian berdasarkan Diklat Formal dan Informal**

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1.	SPAMEN/DIKLATPIM II	1	Orang
2.	SPADYA/DIKLATPIM III	4	Orang
3.	SEPADA/DIKLATPIM IV	4	Orang
4.	Manajemen Persidangan	1	Orang
5.	Pengadaan Barang dan Jasa	15	Orang
6.	Pelayanan Prima	-	Orang
7.	Kursus Keuangan Daerah	2	Orang
8.	Administrasi Kepegawaian	4	Orang
9.	Administrasi Keuangan	4	Orang
10.	Kehumasan dan Keprotokol	-	Orang
11.	Administrasi Perkantoran	-	Orang
12.	Diklat Standar Operasional Prosedur	3	Orang

Sumber: Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, 2018

## B. Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dari sisi prasarana, Sekretariat DPRD Kota Bekasi sudah memiliki kantor sendiri. Untuk mobilitas, Sekretariat DPRD Kota Bekasi memiliki 17 unit mobil, yaitu 12 unit untuk

Sekretariat DPRD, 1 Unit untuk Kepala Sekretariat Dewan, 4 unit untuk para Kepala Bagian, 6 Unit untuk para Kepala Sub Bagian dan 5 unit untuk Pimpinan Anggota DPRD serta 1 Unit Mobil Operasional Mikro bus Sementara untuk kendaraan dinas Roda Dua 29 Unit Sepeda Motor. Sedangkan kendaraan dinas roda empat untuk anggota DPRD sebanyak 46 orang administrasi pencatatan kendaraannya berada di Asset BPKAD Pemerintah Kota Bekasi. Dengan Ketersediaan kendaraan dinas baik itu roda empat maupun roda dua untuk mendukung mobilitas operasional dan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas baik untuk anggota DPRD maupun untuk Sekretariat DPRD.

**Tabel 2.4. Peralatan/Kendaraan pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi**

No	Kendaraan	Banyaknya	Jenis	Peruntukan
1	Mobil Operasional	4	Toyota All New Fortuner	Operasional Pimpinan DPRD
2	Mobil Operasional	4	Daihatsu Terios	Operasional Kepala Bagian
3	Mobil Operasional	1	Toyota Kijang Inova	Operasional Sekretaris DPRD
4	Mobil Operasional	1	Kia Peggio	Operasional Sekretariat DPRD
5	Mobil Operasional	1	Szuku Futura	Operasional Sekretariat DPRD
6	Mobil Operasional	3	Toyota Kijang	Operasional Kasubag
7	Mobil Operasional	1	Hino	Operasional Sekretariat
8	Mobil Operasional	1	Toyoya Vellfire	Operasional Ketua DPRD
9	Mobil Operasional	1	Nissan Terano	Operasional Bendahara Rutin
10	Sepeda Motor Operasional	12	Yamaha X-Ride	Operasional Kasubag
11	Sepeda Motor Operasional	2	Honda Beat	Operasional Pengurus Barang
12	Sepeda Motor Operasional	1	Honda New Revo	Operasional Sekretariat
13	Sepeda Motor Operasional	4	Honda MCB	Operasional Sekretariat
14	Sepeda Motor Operasional	1	Honda Astrea	Operasional Sekretariat

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Tahun 2018

Kondisi aset di Sekretariat DPRD dalam kondisi baik, dan ada beberapa yang rusak. Hal ini dapat dilihat pada tabel 2.5.

**Tabel 2.5. Aset Sekretariat DPRD Kota Bekasi**

NO	URAIAN	JUMLAH		KETERANGAN
1	2	3		4
1	<b><u>Tanah Bangunan Kantor Pemerintah</u></b>	10.000	m2	Baik
2	<b><u>Portable Generating Set</u></b>	1	unit	Baik
3	Mesin Penghitung Uang	2	unit	Baik
4	Lemari Besi	11	unit	Baik
5	Rak Besi/Metal	19	unit	Baik
6	Rak Kayu	2	unit	Baik
7	Filling Besi/Metal	71	unit	Baik
8	Band Kas	2	unit	Baik
9	Lemari Kaca	7	unit	Baik
10	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor Lainnya (Tambahan)	3	unit	Baik
11	Papan Visuil	8	unit	Baik
12	Alat Penghancur Kertas	11	unit	Baik
13	Papan Pengumuman	5	unit	Baik
14	Copy Board/Elektrik White Board	2	unit	Baik
15	Alat Kantor Lainnya (Lain-lain)	3	unit	Baik
16	Lemari Kayu	15	unit	Baik
17	Rak Kayu	21	unit	Baik



NO	URAIAN	JUMLAH		KETERANGAN
1	2	3		4
18	Meja Kayu/Rotan	1	unit	Baik
19	Kursi Besi/Metal	8	unit	Baik
20	Meja Rapat	56	unit	Baik
21	Meja Tulis	14	unit	Baik
22	Meja Reseption	1	unit	Baik
23	Kursi Rapat	151	unit	Baik
24	Kursi Tamu	172	unit	Baik
25	Kursi Putar	43	unit	Baik
26	Kursi Biasa	25	unit	Baik
27	Kursi Lipat	84	unit	Baik
28	Meja Komputer	2	unit	Baik
29	Meja Biro	134	unit	Baik
30	Sofa	13	unit	Baik
31	Jam Elektronik	1	unit	Baik
32	Jam Elektronik	1	unit	Baik
33	Alat Pembersih Lain-lain	3	unit	Baik
34	Lemari Es	6	unit	Baik
35	AC Sentral	7	unit	Baik
36	AC Unit	82	unit	Baik
37	Tabung Gas	6	unit	Baik
38	Televisi	17	unit	Baik
39	Sound System	13	unit	Baik
40	Wireless	3	unit	Baik
41	Microphone	3	unit	Baik
42	Camera Video	1	unit	Baik
43	Camera Film	11	unit	Baik
44	Mimbar/Podium	1	unit	Baik
45	Coofie Maker	2	unit	Baik
46	Handy Cam	4	unit	Baik
47	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	unit	Baik
48	Alat Pemdarn Kebakaran Lain-lain	34	unit	Baik
49	Mainframe	7	unit	Baik
50	Personal Komputer Lain-lain	3	unit	Baik
51	P.C Unit	75	unit	Baik
52	Lap Top	12	unit	Baik
53	Note Book	14	unit	Baik
54	Hard Disk	3	unit	Baik
55	Printer	68	unit	Baik
56	Scanner	1	unit	Rusak
57	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	6	unit	Baik
58	Peralatan Jaringan Lain-lain	1	unit	Baik
59	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	40	unit	Baik
60	Meja Rapat Pejabat Eselon II	6	unit	Baik
61	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	11	unit	Baik
62	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	88	unit	Baik
63	Kursi Rapat Pejabat Eselon II	7	unit	Baik
64	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff	30	unit	Baik
65	Kursi Rapat Pejabat Lain-lain	5	unit	Baik
66	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Lain-lain	68	unit	Baik
67	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	16	unit	Baik
68	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	2	unit	Baik
69	Buffet Kayu	11	unit	Baik
70	Camera + Attachment	31	unit	Baik

NO	URAIAN	JUMLAH		KETERANGAN
1	2	3		4
71	Proyektor + Attachment	15	unit	Baik
72	Microphone/Wireless Mic	2	unit	Baik
73	Digital Audio Tape Recorder	8	unit	Baik
74	Peralatan studio Visual Lain-lain	1	unit	Baik
75	Power Supply	5	unit	Baik
76	Layar Film	2	unit	Baik
77	Mesin Cacah	2	unit	Baik
78	Amplifier	2	unit	Baik
79	Microphone	1	unit	Baik
80	Loudspeaker	1	unit	Baik
81	Sound System	44	unit	Baik
82	Telephone (PABX)	2	unit	Baik
83	Pesawat Telephone	6	unit	Baik
84	Handy Talky	10	unit	Baik
85	Facsimile	1	unit	Baik
86	Alat Komunikasi Lain-lain	10	unit	Baik
87	Alat Komunikasi Sosial Lain-lain	1	unit	Baik
88	Antena SHF/Parabola Portable	1	unit	Rusak
89	Alat Pemadam Kebakaran	6	unit	Baik
90	<b>Bangunan Gedung Kantor Permanen</b>	21	unit	Baik
91	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	5	unit	Baik
92	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	1	unit	Baik
93	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	unit	Baik
94	Gedung Pos Jaga Permanen	1	unit	Baik
95	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	unit	Baik
96	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	1	unit	Baik
97	<b>Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain</b>	1	unit	Baik
98	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA	1	unit	Baik
99	Jaringan Transmisi Tegangan Dibawah 100 KVA	1	unit	Baik
100	<b>Ilmu Pengetahuan umum</b>	1	unit	Baik
101	Encyclopedia, Kamus, Buku Referensi	1	buah	Baik
102	Buku Umum Lain-lain	151	buah	Baik
103	Buku Umum Lain-lain	564	buah	Baik
104	Buku Agama Lain-lain	1	buah	Baik
105	Ilmu Politik	32	buah	Baik
106	Ekonomi	4	buah	Baik
107	Hukum	220	buah	Baik
108	Buku Ilmu Sosial Lain-lain	25	buah	Baik
109	Buku Ilmu Bahasa Lain-lain	1	buah	Baik
110	Astronomi, Geodesi	1	buah	Baik
111	Ilmu Perdagangan Khusus Industri	1	buah	Baik
112	Buku Ilmu Pengetahuan Praktis Lain-lain	3	buah	Baik
113	Geografi, Eksplorasi	1	buah	Baik
114	Sejarah	1	buah	Baik
115	Buku Laporan Lain-lain	92	buah	Baik
116	Buku Peta (Atlas)	1	buah	Baik
117	Lukisan Lain-lain	1	buah	Baik
118	Server	2	unit	Baik

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Tahun 2018

Secara keseluruhan jika melihat dari daftar aset yang dimiliki Sekretariat DPRD Kota Bekasi telah mencukupi memadai namun demikian kondisi tersebut harus tetap diperbaharui setiap tahunnya, karena kebutuhan dan perkembangan teknologi setiap tahunnya tentu

berbeda. Untuk memenuhi kekurangan sarana prasarana tersebut kami menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan organisasi baik itu penambahan aparatur, prasarana, sarana maupun kendaraan dinas operasional.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai ditingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sementara pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Sekretariat DPRD Kota Bekasi melaksanakan Tujuan, Sasaran yang ditunjang oleh 1 (satu) program BLU dengan 15 (lima belas) kegiatan dan 5 (enam) Program BLPU dengan 22 (dua puluh dua) kegiatan dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
2. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
7. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Capaian kinerja yang tergambar diatas memperlihatkan tingkat pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam memberikan pelayanan guna memfasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kota Bekasi selama periode 5 tahun (2013-2018).

Indikator Kinerja Sekretariat DPRD pada Renstra 2013-2018 terdapat 2 (dua) indikator kinerja yaitu 1) Prosentase Media Informasi; 2) Prosentase Peningkatan Kinerja DPRD. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2017 indikator kinerja Sekretariat DPRD di ubah menjadi Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD sesuai dengan tupoksi Sekretariat DPRD. Hal ini seperti terlihat pada tabel 2.6.

Dari tabel 2.6 bahwa indikator kinerja Prosentase Media Informasi dengan target IKK Jumlah media informasi dari tahun 2014 s.d 2015 realisasi 100% dari target 80% (2014) dan 85% (2015), sedangkan pada tahun 2016 terealisasi 92,30% dari target 80%. Dengan rasio capaian 125% (2014), 118% (2015) dan 103% (2016) Pada tahun 2017 indikator kinerja tersebut tidak dilaksanakan lagi dan di ganti dengan indikator kinerja Prosentase Peningkatan Kinerja DPRD.

Indikator kinerja Prosentase Peningkatan Kinerja DPRD dengan target IKK Prosentase Raperda yang disetujui DPRD dari tahun 2014 s.d 2016 masing-masing ditargetkan secara berurut 80% (2014), 85% (2015), 90% (2016) dengan realisasi tahun 2014 (80%), tahun 2015 (72,72%) tidak tercapai , 50% pada tahun 2016 hal ini disebabkan pembahasan RAPERDA yang

dianggarkan di APBD-P tidak semuanya dapat dilaksanakan, mengingat kegiatan di DPRD banyak dilaksanakan secara bersamaan yang mengakibatkan tidak cukup waktu pembahasan. sehingga berakibat pada rasio capaian hanya 86% (2015) dan 56% (2016).

Pada tahun 2017 target IKK menjadi Keputusan DPRD yang dari target 95% terealisasi 105% sehingga rasio ketercapaian menjadi 111%. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2017 indikator kinerja Sekretariat DPRD di ubah menjadi ***Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD*** mulai tahun 2017 dengan target 75 pada tahun 2018. Realisasi Indeks Kepuasan tahun 2018 yaitu 75,12.



**Tabel 2.6**  
**Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2014-2018 dengan Target RPJMD Kota Bekasi**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	Prosentase Media Informasi	-	Jumlah media informasi	-	80%	85%	90%	95%	-	100%	100%	92,30%	-	-	0.25 %	0.17%	0.025%	-	-
2	Prosentase Peningkatan Kinerja DPRD	-	• Prosentase Raperda yang disetujui DPRD	-	80%	85%	90%	-	-	80%	72,72%	50%	-	-	0	- 0.14%	-0.44%	-	-
			• Keputusan DPRD yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	95%	-	-	-	-	-	105%	-	-	-	-	0.63%
3	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	-	Indeks Kepuasan	Anggota DPRD Kota Bekasi	-	-	-	-	75	-	-	-	-	75,12	-	-	-	-	0.0016

Sumber: LAKIP Sekretariat DPRD 2018

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi harus direvisi, karena berdasarkan evaluasi tersebut indikator yang telah ada tidak menggambarkan indikator kinerja. Untuk itu Sekretariat DPRD melakukan revisi terhadap indikator kinerja seperti pada tabel 2.6. Beberapa target tahun 2018 ada yang kosong hal ini dikarenakan indikator tersebut tidak digunakan lagi dan diganti dengan indikator kinerja yang lebih tepat yaitu Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD.

Tabel 2.8. Rasio Realisasi dan Anggaran Program RENSTRA Sekretariat DPRD Tahun 2013-2018

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.469.443.000	8.176.200.000	9.128.500.000	9.842.100.000	9.472.300.000	6.608.657.404	6.236.017.451	7.894.212.839	8.708.795.463	4.126.672.035	78,03%	76,27%	86,48%	88,49%	43,57%	3,06%	-5,34%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.810.000.000	2.100.000.000	2.450.000.000	2.150.000.000	2.400.000.000	1.281.782.057	1.721.438.327	2.012.122.128	1.652.001.977	508.315.687	70,82%	81,97%	82,13%	76,84%	21,18%	8,02%	-8,99%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	601.400.000	590.000.000	1.000.000.000	1.050.000.000	1.262.590.000	590.159.000	574.045.000	952.366.500	960.174.000	141.208.650	98,13%	97,30%	95,24%	91,45%	11,18%	23,21%	-5,32%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	600.000.000	416.707.500	700.000.000	700.000.000	650.000.000	327.045.000	42.123.000	564.492.803	556.024.718	331.828.005	54,51%	10,11%	80,64%	79,43%	51,05%	7,57%	399,43%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	250.000.000	410.000.000	495.000.000	825.000.000	680.000.000	141.432.000	133.317.079	430.217.500	195.251.500	562.380.126	56,57%	32,52%	86,91%	23,67%	82,70%	33,46%	87,59%
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.535.000.000	900.000.000	600.000.000	0	0	903.333.700	692.850.645	501.553.550	0	0	58,85%	76,98%	83,59%	0	0	-58,23%	0
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	26.950.000.000	16.250.392.000	21.940.430.000	44.181.660.000	49.010.000.000	15.736.699.690	9.244.483.335	17.622.009.122	33.931.778.226	15.929.211.065	58,39%	56,89%	80,32%	76,80%	32,50%	26,90%	95,88%

Sumber: RENSTRA Sekretariat DPRD 2013-2018, diolah.

Rasio ketercapaian selama 5 (lima) tahun pelaksanaan antara realisasi dan anggaran program Renstra Sekretariat Daerah tahun 2013-2018, dengan rincian program sebagai berikut:

1. Ketercapaian rasio anggaran tertinggi pada tahun 2017 dengan realisasi 88,49% dan terendah pada tahun 2015 yaitu 76,27%, dengan realisasi rata-rata pertumbuhan anggaran -5,34% dari 3,06% untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dikarenakan pemenuhan kebutuhan sarana pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ketercapaian rasio anggaran tertinggi pada tahun 2016 dengan realisasi 82,13% dan terendah pada tahun 2014 yaitu 70,82%, dengan realisasi rata-rata pertumbuhan anggaran -8,99% dari 8,02%. Hal ini karena ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.
3. Ketercapaian rasio anggaran tertinggi pada tahun 2014 dengan realisasi 98,13% dan terendah pada tahun 2017 yaitu 91,45% dengan realisasi rata-rata pertumbuhan anggaran -5,32% dari 23,21% pada Program Peningkatan Disiplin Aparatur. Hal ini dikarenakan realisasi penyerapan anggaran tidak sesuai dengan target.
4. Ketercapaian rasio anggaran tertinggi pada tahun 2016 dengan realisasi 80,64% dan terendah pada tahun 2015 yaitu 10,11%, dengan realisasi rata-rata pertumbuhan anggaran 399,43% dari 7,57% Program pada Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. Hal ini dikarenakan pada tahun 2015 penyerapan anggaran sangat rendah.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ketercapaian rasio anggaran tertinggi pada tahun 2017 dengan realisasi 86,91% dan terendah pada tahun 2017 yaitu 23,67% dengan realisasi rata-rata pertumbuhan anggaran 87,59% dari 33,46%.
6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa pada tahun 2016 rasio antara realisasi dan anggaran ketercapaian tertinggi mencapai 83,59% terendah pada tahun 2017 0% dikarenakan pada tahun 2017 tidak ada kegiatan yang dilaksanakan pada program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
7. Ketercapaian rasio anggaran tertinggi pada tahun 2016 dengan realisasi 80,32% dan terendah pada tahun 2015 mencapai 56,89%, dengan realisasi rata-rata pertumbuhan anggaran 95,88% dari 26,90% untuk Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

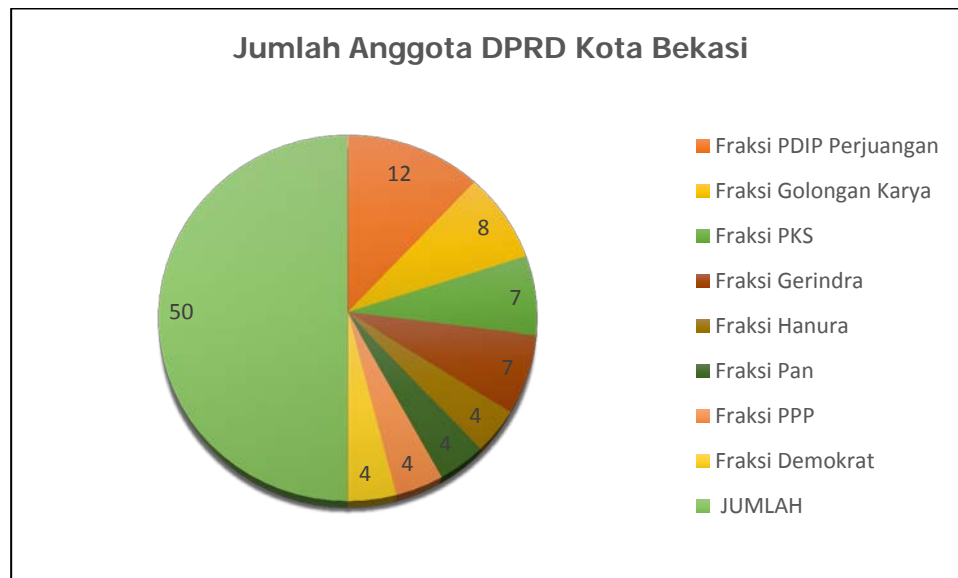
#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Setwan berkaitan dengan kinerja DPRD Kota Bekasi agar kinerjanya maksimal.

##### **Anggota DPRD Kota Bekasi**

Berdasarkan data pada pemilihan legislative tahun 2015-2019 untuk data jumlah Anggota DPRD berjumlah 50 orang dengan jumlah fraksi sebanyak:

**Grafik 3 Jumlah Anggota DPRD Kota Bekasi**



Sumber: Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian, 2018

Sekretariat DPRD menempati posisi sebagai unsur Pemerintah Daerah yang bertugas memfasilitasi kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang meliputinya. Adapun tugas pokok dan fungsi DPRD adalah:

- Bidang Legislasi, bersama Walikota menyusun Raperda menjadi Perda
- Bidang Anggaran bersama Walikota menyusun RAPBD menjadi APBD, dan
- Bidang Pengawasan Pelaksanaan Perda, APBD, Perundang-undangan dan Kebijakan Walikota.

Dengan adanya tugas pokok dan fungsi dimaksud diatas, menunjukkan bahwa DPRD adalah bagian dari penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dalam posisi tersebut, Sekretariat DPRD berfungsi sebagai jembatan penghubung kerja antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Sehingga, dengan kata lain Sekretariat DPRD kedudukannya berdiri di atas dua telapak kaki, disatu pihak adalah unsur eksekutif sebagai SKPD dan dilain pihak sebagai fasilitator tugas-tugas legislatif serta bertanggungjawab secara operasional kepada Pimpinan DPRD.

Sekretariat DPRD sebagai unsur Pemerintah Kota Bekasi terus menata diri agar kinerja DPRD Kota Bekasi dapat berjalan secara optimal, seiring dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi telah dikembangkan strukturnya dari menjadi empat bagian dengan sepuluh sub bagian.



Selain hal tersebut, juga terjadi dua perubahan Undang-Undang yang berpengaruh secara langsung terhadap kinerja DPRD Kota Bekasi, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043). Secara umum, kinerja DPRD Kota Bekasi sampai dengan bulan September 2015 dapat berjalan optimal.

Adapun Tugas dan wewenang dari anggota DPRD Kota Bekasi berdasarkan Tatib dan Tupoksi adalah sebagai berikut:

Tugas dan Wewenang DPRD Kota Bekasi, sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan daerah bersama Walikota.
2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda mengenai APBD yang diajukan oleh Walikota;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD;
4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur , untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
5. Memilih Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Walikota;
6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
8. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan kajian/analisis tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Tantangan adalah suatu kondisi yang datang dari luar system organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilan. Tantangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam pengembangan pelayanan antara lain sebagai berikut:

1. Tuntutan Pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD;
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Profesional, Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum lengkap dan memadai;

3. Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD dan Kegiatan-kegiatan DPRD yang bersifat Tentatif
4. Seringnya terjadi perubahan kebijakan secara nasional terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PD;
5. Perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh pada Kode Etik dan tata tertib DPRD;
6. Kebutuhan peningkatan peran dan koordinasi Internal dan Eksternal antar SKPD;
7. Peningkatan supremasi hukum

Selain tantangan-tantangan seperti diuraikan diatas, terdapat pula peluang-peluang yang mendukung terhadap pelaksanaan pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bekasi yaitu:

1. Adanya koordinasi untuk penyesuaian penyusunan peraturan perundang-undangan;
2. Tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan kompeten;
3. Terbukanya kesempatan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM melalui Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang menjadi penunjang pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
5. Adanya penghargaan (Reward) dan sanksi yang tegas (punishment) bagi PNS;
6. Adanya dukungan dari pimpinan dan anggota DPRD
7. Kerjasama dengan SKPD, Instansi terkait, Anggota Forkopimda untuk dialog atau dengar pendapat dalam hal penerimaan Aspirasi dari masyarakat;
8. Komitmen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Jadwal Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) yang disusun oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah;
9. Perkembangan Teknologi.

## BAB III

# Permasalahan dan Isu-Isu Perangkat Daerah

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang.

Hal-hal yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, apabila tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Di samping itu suatu isu strategis merupakan hal-hal yang bersifat mendasar, jangka panjang, mendesak, serta menentukan tujuan di masa yang akan datang.

Merumuskan perencanaan yang kontekstual dan tepat sasaran senantiasa melekat dan terkait dengan Perangkat Daerah. Oleh karena itu pada bagian ini dikemukakan analisis lingkungan strategis yang didasarkan pada permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi baik internal maupun eksternal; telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam rangka untuk penentuan isu-isu strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi.

Mengacu pada tugas pokok dan fungsinya, maka peran Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam memberikan pelayanan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD sangatlah penting, karena kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD selaku entitas penting dalam pembangunan daerah juga ditentukan oleh kenyamanan dan kelancaran fasilitasi terhadap pelaksanaan tiap-tiap kegiatan yang menjadi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Di dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanannya, Setwan menghadapi permasalahan sebagai berikut:

#### 1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Profesional,

Di dalam menjalankan perannya, Setwan menghadapi tuntutan untuk melaksanakan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD. Disisi lain, sumber daya manusia yang dimiliki oleh Setwan saat ini,

sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab sebelumnya masih belum mencukupi. Kebutuhan Setwan dalam menjalankan tugasnya banyak membutuhkan SDM yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informatika, bidang ekonomi dengan disiplin ilmu akuntansi, manajemen dan ilmu ekonomi, manajemen strategis dan perencanaan, dan bidang hukum.

2. Keterbatasan sarana dan pra sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Saat ini kebutuhan akses informasi dan pelayanan terhadap masyarakat yang cepat membutuhkan kecepatan internet, kondisi saat ini kapasitas internet di Sekretariat DPRD masih minim, tentunya menjadi keluhan anggota DPRD Kota Bekasi, untuk mendukung kebutuhan tersebut diperlukan penyediaan jaringan internet yang bebas hambatan dengan kecepatan maksimal. Selain jaringan internet sarana pendukung lainnya adalah komputer. Sarana yang ada saat ini masih ada beberapa aparatur Sekretariat DPRD yang menggunakan komputer dengan spesifikasi rendah sehingga agak menghambat dalam mendukung pelaksanaan kegiatan.

3. Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD yang tidak optimal

Jadwal Agenda DPRD sebelumnya sudah ditetapkan dan dituangkan ke dalam berita acara, namun implementasinya agenda DPRD tersebut tidak dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah disepakati. Hal ini berdampak pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan yang dijadwalkan.

4. Kurang optimalnya dalam melaksanakan program dan kegiatan

Seringnya terjadi perubahan kebijakan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PD serta sering berubahnya kebijakan Pemerintah Pusat mengakibatkan mempengaruhi terhadap kinerja Sekretariat DPRD.

Padatnya jadwal kegiatan DPRD mengakibatkan jadwal kegiatan yang sudah disusun dan disepakati ada kalanya tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal hal ini disebabkan banyaknya kegiatan di luar dari kegiatan Sekretariat DPRD sehingga kegiatan yang sudah dijadwalkan tidak terlaksana karena berbenturan waktu dengan kegiatan yang lain.

**Tabel 3.1.**  
**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Pelayanan Sekretariat DPRD terhadap DPRD Kota Bekasi	Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Profesional	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya kesempatan untuk mengembangkan kompetensi melalui Diklat</li> <li>- Aparatur Sekretariat DPRD yang memiliki kompetensi terbatas</li> <li>- Belum adanya fungsional tertentu di Sekretariat DPRD yang sesuai kebutuhan</li> </ul>
2		Keterbatasan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengadaan sarana prasarana TIK PD belum merata</li> <li>- Anggaran Belanja TIK Terbatas</li> </ul>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3		Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD yang tidak optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Draf Usulan Rancangan Perundangan yang terlambat disampaikan oleh PD</li> <li>- Kurang Komitmen terhadap jadwal kerja yang sudah ditetapkan dalam 1 tahun anggaran</li> </ul>
4		Kurang optimalnya dalam melaksanakan program dan kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan Kebijakan dari Pemerintah Pusat yang terlalu cepat</li> <li>- Seringnya terjadi perubahan kebijakan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi PD</li> <li>- Banyaknya kegiatan di luar Tupoksi DPRD</li> <li>- Padatnya jadwal kegiatan DPRD</li> </ul>

**a. Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih**

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih periode tahun 2018-2023 adalah **“Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan”**. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi RPJMD Kota Bekasi 2018 - 2023, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik.
2. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai.
3. Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif, dan inovatif.
5. Membangun, meningkatkan, dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.

Ditinjau dari misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih periode tahun 2018-2023, misi yang memiliki keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD adalah misi ke-1 yaitu **“meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik”**.

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas pokoknya dalam Tugas pokok Sekretariat DPRD Kota Bekasi yaitu menyelenggarakan pelayanan administrasi memberikan Pelayanan serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih periode Tahun 2018-2023 yang dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD), serta dijabarkan dalam dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja).

Dengan demikian, untuk mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih periode tahun 2018-2023 tersebut, Sekretariat DPRD melaksanakan program dan kegiatan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan PD melalui Renstra Tahun 2019-2023 sampai dengan ditetapkan RPJMD Kota Bekasi melalui Peraturan Daerah Kota Bekasi.

Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih periode tahun 2018-2023 diidentifikasi faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi tersebut sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut.

**Tabel 3.1.**  
**Faktor-Faktor Penghambat dan Pendorong pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam Pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Terpilih Periode Tahun 2018-2023**

<b>Visi: Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan</b>				
<b>No.</b>	<b>Misi</b>	<b>Permasalahan</b>	<b>Faktor</b>	
			<b>Penghambat</b>	<b>Pendorong</b>
1.	Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik	Terlambatnya penetapan peraturan perundangan terkait dokumen perencanaan dan penganggaran usulan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	Perangkat Daerah pengusul dokumen terlambat dalam mengajukan usulan untuk pembahasan	Adanya regulasi terkait penetapan peraturan perundangan
		Terlambatnya penetapan peraturan perundangan atas usulan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	Perangkat Daerah pengusul raperda terlambat dalam mengajukan usulan untuk pembahasan	Adanya regulasi terkait penetapan peraturan perundangan
		Tidak sesuai nya jadwal persidangan dengan jadwal yang telah ditetapkan	Beberapa anggota DPRD belum seluruhnya mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan	Adanya regulasi terkait penetapan peraturan perundangan

#### **b. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Berangkat dari berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi, tantangan dan potensi Pembangunan yang dapat dikembangkan, maka dirumuskan isu strategis pembangunan daerah Kota Bekasi melalui berbagai pertimbangan di antaranya memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran Pembangunan nasional, merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dampak luasnya yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat, memiliki daya bangkit terhadap janji politik yang perlu diwujudkan.

Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan kapasitas SDM Sekretariat DPRD

Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD belum memenuhi dalam mendukung semakin tingginya standar kinerja DPRD melalui pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan dan pembinaan tim kerja yang solid dalam rangka mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya;

b. Peningkatan sarana dan prasarana ICT (*Information Communication technology*) untuk mendukung aksesibilitas informasi.

Belum optimalnya jaringan dan kecepatan internet yang dimiliki Sekretariat DPRD sebagai salah satu sarana informasi dan pelayanan terhadap masyarakat. Kondisi ini menyebabkan kinerja dewan terkait dengan komunikasi dan jejaring masyarakat kurang optimal. Di samping itu hingga saat ini belum ada *official website* untuk masing-masing anggota DPRD yang dapat menunjang kinerja dewan.

## BAB IV Tujuan dan Sasaran

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD

**T**ujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkret dari pada misi dan mengarah ke suatu titik terang pencapaian hasil, dengan adanya pernyataan tujuan yang ditetapkan, maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu dalam upaya menjabarkan visi dan misi organisasi Sekretariat DPRD menetapkan Tujuan dan Indikator Tujuan.

Tujuan : Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Sekretariat DPRD

Indikator tujuan : Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran merupakan bagian internal dari perencanaan strategis SKPD bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir periode, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD maka Sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Sekretariat DPRD

Indikator Sasaran : Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD seperti tergambar pada tabel 4.1.

**Tabel 4.1.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD 2018-2023**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	75	75,50	76	76,50	77



Tabel 4.2.

Formulasi Perhitungan Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD Kota Bekasi

INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN			
	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	<b>Indeks Kepuasan DPRD Terhadap pelayanan</b> - Hasil Survey Kepuasan Anggota DPRD	Sekretaris DPRD	Hasil Survey

Berdasarkan Tabel Perhitungan IKU tersebut, perhitungan IKU “Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD” dilakukan melalui empat tahapan:

1. Tahap I melakukan survei dengan kuesioner yang dibagikan terhadap anggota DPRD Kota Bekasi untuk menilai pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan kegiatan di lingkup anggota DPRD yang mencakup unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (Anggota DPRD) terdiri dari 9 unsur yang terdiri dari:
  - a. **Persyaratan** adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif
  - b. **Sistem mekanisme dan prosedur** adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan
  - c. **Waktu penyelesaian** adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan
  - d. **Biaya/Tarif** adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat
  - e. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan** adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan
  - f. **Kompetensi Pelaksana** adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman.
  - g. **Perilaku Pelaksana** adalah sikap petugas memberikan pelayanan
  - h. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut

- i. **Sarana** adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Target yang akan dicapai dalam setiap tahun selama 5 tahun ke depan seperti pada tabel 4.1.



#### 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD

##### 5.1.1. Strategi Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Penyusunan strategi dapat diidentifikasi melalui analisa SWOT, baik dari kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman/tantangan, antara lain :

Kekuatan dalam pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD diantaranya:

1. Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi landasan
2. Tersedianya jumlah SDM yang memadai

Tantangan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam pengembangan pelayanan antara lain sebagai berikut:

1. Tuntutan Pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD;
2. Kebutuhan peningkatan peran dan koordinasi Internal dan Eksternal antar SKPD;

Kelemahan yang dihadapi dalam melakukan pelayanan diantaranya:

1. Sistem dan prosedur pelayanan belum optimal
2. Kurangnya SDM yang professional dan kompeten

Peluang yang mendukung terhadap pelaksanaan pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD Kota Bekasi yaitu:

1. Adanya koordinasi untuk penyesuaian penyusunan peraturan perundang-undangan;
2. Adanya keterbukaan informasi publik

Strategi yang ditetapkan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam rangka meningkatkan kapasitas pelayanan terhadap DPRD, adalah :

1. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Bekasi;
2. Meningkatkan pemahaman anggota DPRD terhadap Peraturan Perundang-undangan.
3. Mengoptimalkan penggunaan system informasi dalam rangka dukungan pelaksanaan administrasi umum kepegawaian.
4. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai.
5. Meningkatkan penyelenggaraan layanan administrasi keuangan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja.

6. Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran.
7. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bagi pegawai.

### 5.1.2. Kebijakan Sekretariat DPRD.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan visi, misi, tujuan dan sasaran.

Berdasarkan strategi yang telah ditetapkan maka **kebijakan** yang akan diambil oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi berdasarkan Strategi di atas, adalah :

1. **Strategi 1**; Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Bekasi. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan Meningkatkan Fasilitas Pelaksanaan Rapat-rapat Paripurna, Rapat Alat-alat Kelengkapan Dewan, Rapat Hearing/ Dialog dengan PD dan Masyarakat serta Pelaksanaan Reses.
2. **Strategis 2** : Meningkatkan Pemahaman Anggota DPRD terhadap Peraturan Perundang-undangan. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas SDM Pimpinan dan anggota DPRD melalui konsultasi, kunjungan kerja, bimtek, dan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
3. **Strategi 3** : Mengoptimalkan penggunaan system informasi dalam rangka dukungan pelaksanaan administrasi umum kepegawaian. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan peningkatan pelayanan kepegawaian.
4. **Strategi 4** : Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan pelaksanaan pelatihan.
5. **Strategi 5** : Meningkatkan penyelenggaraan layanan administrasi keuangan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah peningkatan pengelolaan administrasi keuangan.
6. **Strategi 6** : Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran. untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah pengadaan sarana dan prasaran sesuai kebutuhan.
7. **Strategi 7** : Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bagi pegawai. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran dan inventarisasi sarana dan prasarana.

Strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD seperti terlihat pada tabel 5.1. berikut ini:

**Tabel 5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD Tahun 2018-2023**

<b>Visi</b>		: Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan		
<b>Misi I</b>		: Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1	Mewujudkan dukungan layanan sekretariat DPRD terhadap kinerja DPRD	Meningkatnya kualitas layanan sekretariat DPRD terhadap tugas dan fungsi DPRD	1. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Bekasi;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kota Bekasi.</li> <li>• Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan Meningkatkan Fasilitas : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan Rapat-rapat Paripurna;</li> <li>- Rapat Alat-alat Kelengkapan Dewan;</li> <li>- <i>Publik Hearing/</i> Dialog dengan PD dan Masyarakat;</li> <li>- Pelaksanaan Reses; dan</li> <li>- Dengar Pendapat.</li> </ul> </li> </ul>
			2. Meningkatkan pemahaman anggota DPRD terhadap Peraturan Perundang-undangan.	<p>Meningkatkan Pemahaman Anggota DPRD terhadap Peraturan Perundang-undangan. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas SDM Pimpinan dan anggota DPRD melalui : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsultasi;</li> </ul> </li> </ul>

<b>Visi</b>	: Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan		
<b>Misi I</b>	: Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kunjungan kerja;</li> <li>- Bimtek; dan</li> <li>- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.</li> </ul>
		3. Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam rangka dukungan pelaksanaan administrasi umum kepegawaian.	<p>Mengoptimalkan penggunaan system informasi dalam rangka dukungan pelaksanaan administrasi umum kepegawaian. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pelayanan kepegawaian;</li> <li>• Official website.</li> </ul>
		4. Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai.	<p>Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan</li> </ul>

<b>Visi</b>	: Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan		
<b>Misi I</b>	: Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
			pelatihan.
		5. Meningkatkan penyelenggaraan layanan administrasi keuangan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja.	<p>Meningkatkan penyelenggaraan layanan administrasi keuangan, pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pengelolaan administrasi keuangan, Evaluasi Capaian Kinerja Sekretariat DPRD.</li> </ul>
		6. Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran.	<p>Mengoptimalkan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran. untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengadaan sarana dan prasaran sesuai kebutuhan.</li> </ul>
		7. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bagi pegawai.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana bagi pegawai. Untuk mendukung capaian target strategi yang optimal, maka langkah kebijakan yang akan dilakukan</li> </ul>

<b>Visi</b>	: Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera, dan Ihsan		
<b>Misi I</b>	: Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
			<p>adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran dan inventarisasi sarana dan prasarana.</li> </ul>



## BAB VI

# Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu.

Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan yang ada pada Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang tertuang dalam Renstra Tahun 2018-2023, yaitu:

### I Program Administrasi, Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Indikator Kinerja : *Persentase Terasilinasinya Proses Penyusunan dan*  
(Outcome) *Penetapan APBD dan LAPBD*  
Hasil : LHP-BPK, LP2APBD, KUA PPAS Murni, KUA PPAS, APBD Murni,  
APBD.

#### 1 Kegiatan Reses DPRD Kota Bekasi

Indikator : Terlaksananya Reses DPRD  
Keluaran  
(Output)  
Hasil : Tersedianya data aspirasi masyarakat hasil Reses 2019  
  
Kelompok : Anggota DPRD, Sekretariat DPRD dan Masyarakat Kota Bekasi  
Sasaran

#### 2 Penyelenggaraan Kegiatan Badan Anggaran

Indikator : Terselenggaranya Pembahasan LHP BPK  
Keluaran  
(Output)  
Terselenggaranya Pembahasan LP2APBD  
Terselenggaranya Pembahasan KUA PPAS Murni  
Terselenggaranya Pembahasan KUA PPAS  
Terselenggaranya Pembahasan APBD  
Terselenggaranya Pembahasan APBD Murni  
  
Hasil : Tersedianya APBD-P TA. 2019 / APBD TA. 2020, Pembahasan  
LHP/LP2APBD/APBD-P/APBD  
Kelompok : Anggota Badan Anggaran, Sekretariat DPRD, TAPD dan OPD se-  
Sasaran Kota Bekasi

#### 3 Kunjungan, Rapat Kerja dan Studi Banding Komisi dan Badan Kehormatan DPRD Kota Bekasi

Indikator : Terlaksananya Kegiatan Kunjungan, Rapat Kerja dan Studi Banding  
Keluaran  
(Output) Komisi dan Badan Kehormatan DPRD Kota Bekasi  
Hasil : Meningkatkan Kualitas Kerja dan Sebagai Bahan Membuat  
Kebijakan Pimpinan dan Anggota DPRD

Kelompok Sasaran : Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Indikator Kinerja (Outcome) : ***Persentase Terasilinasinya Proses Penyusunan dan Penetapan PERDA***

Hasil : Naskah akademis dan Raperda inisiatif, Propemperda naskah akademis dan Raperda Inisiatif, Kajian/ telaahan naskah akademis dan Raperda Inisiatif

### ***1 Penyelenggaraan Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD Kota Bekasi***

Indikator Keluaran (Output) : Kajian/Telaahan Kelompok Pakar atau Tim Ahli, Kajian/Telaahan Kelompok Pakar/Tenaga Ahli Fraksi

Hasil : Dimanfaatkannya Kajian/Makalah Oleh Dewan

Kelompok Sasaran : Sekretariat DPRD Kota Bekasi

### ***2 Pelaksanaan Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi***

Indikator Keluaran (Output) : Sidang Persetujuan Bersama KUA PPAS

Sidang Penetapan RAPBD

Sidang Penetapan APBD

Sidang Paripurna Penyampaian LAPBD

Sidang Paripurna LAPBD

Hasil : Ditetapkannya Peraturan Daerah dan Peraturan Pemerintah Daerah Lainnya melalui Rapat-rapat

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD, Masyarakat Kota Bekasi, Eksekutif

### ***3 Penyelenggaraan Pansus dan Pembahasan Raperda***

Indikator Keluaran (Output) : Nota Kesepakatan Raperda Menjadi Perda

Hasil : Tersedianya Peraturan Daerah Kota Bekasi

Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi

### ***4 Pengelolaan Dokumentasi Produk Hukum***

Indikator Keluaran (Output) : Terdokumentasinya Produk Hukum

Hasil : Tersedianya Buku Tata Tertib DPRD Kota Bekasi

Kelompok Sasaran : Sekretariat DPRD

### ***5 Penyelenggaraan Kegiatan Rapat Pimpinan dan Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi***

Indikator Keluaran (Output) : Terselenggaranya Rapat Badan Musyawarah KUA/PPAS

Terselenggaranya Rapat Badan Musyawarah RAPBD

Terselenggaranya Rapat Badan Musyawarah APBD

Terselenggaranya Rapat Badan Musyawarah Penyampaian LAPBD

Terselenggaranya Badan Musyawarah LPAPBD

Hasil : Tersusunnya agenda / kebijakan Pimpinan dan Kebijakan Badan Musyawarah

Kelompok Sasaran : Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

## **6 Penelaahan dan Penyusunan Produk Hukum**

Indikator Keluaran (Output) : Naskah Akademis dan Raperda Inisiatif/Propemperda

Hasil : Dimanfaatkannya 5 (lima) Draft Raperda Inisiatif untuk menjadi Raperda, 1 (satu) Propemperda 2020 dan 6 (enam) Kajian Produk Hukum 100 % Kelompok Sasaran Kegiatan : DPRD Kota Bek

Kelompok Sasaran : DPRD Kota Bekasi dan Pemerintah Kota Bekasi

## **7 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**

Indikator Keluaran (Output) : Terlaksananya Sosialisasi Peraturan PerUndang-Undangan Terhadap Masyarakat dan Aparatur OPD Terkait

Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah

Hasil : Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Tentang Peraturan Daerah

Kelompok Sasaran : Masyarakat Kota Bekasi

Indikator Kinerja (Outcome) : **Persentase Terasililitasnya Kegiatan DPRD**

Hasil : Terlaksananya ADEKSI dan ASDEKSI, Bimtek Orientasi Pendalaman Tugas, Bimtek Lemhanas, Bimtek Partai, Medical Check Up.

## **1 Penyelenggaraan Asosiasi Sekretariat DPRD Seluruh Indonesia dan Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (ASDEKSI dan ADEKSI)**

Indikator Keluaran (Output) : Terselenggaranya ASDEKSI

Terselenggaranya ADEKSI

Hasil : Meningkatnya Kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Kelompok Sasaran : Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi Serta Aparatur Sekretariat DPRD Kota Bekasi

## **2 Peningkatan Kapasitas DPRD Kota Bekasi**

Indikator Keluaran (Output) : Terlaksananya Bimtek Orientasi Pendalaman Tugas

Bimtek Lemhanas

Bimtek Partai

Medical Check Up

Hasil : Meningkatnya Wawasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi dan Terkontrolnya Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

Kelompok Sasaran : Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi

### **3 Rangkaian Kegiatan HUT Kota Bekasi dan HUT RI**

Indikator Keluaran (Output) : Terselenggaranya Rapat Paripurna Istimewa

Terlaksananya Pertunjukan Seni Budaya

Tersedianya Pakaian Adat

Hasil : Terselenggaranya Rangkaian Kegiatan HUT Kota Bekasi dan HUT RI

Kelompok Sasaran : Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretariat DPRD dan Tamu Undangan

### **4 Medical Check Up**

Indikator Keluaran (Output) : Terfasilitasinya Medical Check Up DPRD

Hasil : Hasil Medical Check Up DPRD

Kelompok Sasaran : Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bekasi

Indikator Kinerja (Outcome) : **Persentase Terfasilitasinya Informasi DPRD**

Hasil : Terpublikasinya Kegiatan DPRD Kota Bekasi

### **1 Pengelolaan Media Center DPRD Kota Bekasi**

Indikator Keluaran (Output) : Kerjasama Media Cetak

Media Online

Live Event Radio Swasta

Talk Show

Pemeliharaan Jaringan

Karangan Bunga

Kerjasama Radio Swasta

Buletin Swara DPRD

Peliputan

Hasil : Terpublikasinya Kegiatan DPRD Kota Bekasi

Kelompok Sasaran : Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD dan Masyarakat

## **II Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Indikator Kinerja (Outcome) : Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkantoran

Hasil : 100%

**1 *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik***

Indikator : Terlaksananya penyediaan jasa sambungan telepon, terlaksananya  
Keluaran : peny. jasa sambungan listrik, terlaksananya peny. jasa sambungan  
(Output) internet, terlaksananya peny. jasa sambungan TV kabel dan  
terlaksananya peny. jasa sambungan internet & finger print  
Hasil : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kelompok : Sekretariat DPRD  
Sasaran

**2 *Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor***

Indikator : Terlaksananya jasa kebersihan gedung sekretariat dan  
Keluaran : humas Terlaksananya jasa kebersihan gedung  
(Output) paripurna Terlaksananya jasa petugas kebersihan halaman/taman  
gedung DPRD Terlaksananya pemeliharaan alat-alat pengolahan  
sampah

Hasil : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kelompok : Sekretariat DPRD  
Sasaran

**3 *Penyediaan Alat Tulis Kantor***

Indikator : Tersedianya Alat Tulis Kantor

Keluaran  
(Output)

Hasil : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kelompok : SEKRETARIAT DPRD  
Sasaran

**4 *Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan***

Indikator : Barang Cetak dan Penggandaan

Keluaran  
(Output)

Hasil : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kelompok : Sekretariat DPRD  
Sasaran

**5 *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor***

Indikator : Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan

Keluaran  
(Output)

Hasil : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kelompok : Sekretariat DPRD  
Sasaran

**6 *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan***

Indikator : Optimalisasi Pelayanan Perkantoran

Keluaran  
(Output)

Hasil : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kelompok : Sekretariat DPRD  
Sasaran

**7 *Penyediaan Makanan dan Minuman***

Indikator : Terlaksananya penyediaan makan minum harian pimpinan DPRD,  
Keluaran : Sekwan, Kabag dan Pegawai Terlaksananya penyediaan makan

(Output) : minum rapat Terlaksananya penyediaan makan minum tamu dan pengamanan

Hasil : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kelompok Sasaran : Sekretariat DPRD

#### **8 *Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah***

Indikator Keluaran (Output) : Terlaksananya Rapat - Rapat dan Konsultasi Luar Daerah

(Output)

Hasil

: Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kelompok Sasaran : Sekretariat DPRD

Sasaran

#### **9 *Penyedia Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran***

Indikator Keluaran (Output) : Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran

(Output)

Hasil

: Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kelompok Sasaran : Sekretariat DPRD

Sasaran

#### **10 *Penyediaan Jasa Keamanan Kantor***

Indikator Keluaran (Output) : Terlaksananya pengamanan unsur Polisi Terlaksananya pengamanan unsur TNI Terlaksananya pengamanan unsur Satpol PP Terlaksananya unsur DISHUB Terlaksananya jasa keamanan (satuan pengamanan) gedung DPRD

Hasil : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kelompok Sasaran : Sekretariat DPRD

Sasaran

### **III Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Indikator Kinerja (Outcome) : Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Hasil : 100%

#### **1 *Pengadaan Peralatan Gedung Kantor***

Indikator Keluaran (Output) : Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

(Output)

Hasil

: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Kelompok Sasaran : Sekretariat DPRD

Sasaran

#### **2 *Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan***

Indikator Keluaran (Output) : Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan

(Output)

Hasil

: Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur

Kelompok Sasaran : Sekretariat DPRD

Sasaran

#### **3 *Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional***

Indikator : Terlaksananya pembayaran BBM, Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional roda 4, bis roda 6 dan roda 2  
Keluaran (Output) : Terlaksananya pembayaran STNK kendaraan operasional roda 4, bis roda 6 dan roda 2  
Hasil : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur  
Kelompok : Sekretariat DPRD  
Sasaran

**4 *Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor***

Indikator : Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor  
Keluaran (Output)  
Hasil : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur  
Kelompok : Sekretariat DPRD  
Sasaran

**5 *Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur***

Indikator : Terlaksananya pemeliharaan meubelair  
Keluaran (Output)  
Hasil : Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur  
Kelompok : Sekretariat DPRD  
Sasaran

**IV Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Indikator Kinerja : Optimalisasi Peningkatan Disiplin Aparatur  
(Outcome)  
Hasil : 100%

**1 *Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya***

Indikator : Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya  
Keluaran (Output)  
Hasil : Meningkatnya Disiplin Aparatur  
Kelompok : Sekretariat DPRD  
Sasaran

**2 *Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu***

Indikator : Terlaksananya pengadaan pakaian hari-hari tertentu  
Keluaran (Output)  
Hasil : Meningkatnya Disiplin Aparatur  
Kelompok : Sekretariat DPRD  
Sasaran

**3 *Pengadaan Pakaian Olah Raga***

Indikator : Terlaksananya pengadaan pakaian olah raga  
Keluaran (Output)  
Hasil : Meningkatnya Disiplin Aparatur  
Kelompok : Sekretariat DPRD  
Sasaran

**V Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Indikator Kinerja : Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur  
(Outcome)  
Hasil : 100%

**1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal**

Indikator : Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Non Formal  
Keluaran  
(Output)  
Hasil : Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur  
  
Kelompok : SEKRETARIAT DPRD  
Sasaran

**IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**

Indikator Kinerja : Prosentase Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat  
(Outcome) Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota  
Hasil :

**1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Indikator : Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)  
Keluaran  
(Output)  
Hasil : Meningkatnya Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan  
  
Kelompok : Sekretariat DPRD  
Sasaran

**2 Penyusunan Laporan Keuangan**

Indikator : Tersusunnya Laporan Bulanan, Laporan Semesteran, Laporan Akhir  
Keluaran Tahun dan Laporan CaLK  
(Output)  
Hasil : Meningkatnya Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan  
  
Kelompok : Sekretariat DPRD  
Sasaran

**3 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja**

Indikator : Renstra 2018-2023, Renja 2020 Sekretariat DPRD Kota Bekasi,  
Keluaran Laporan Agenda Kerja DPRD Kota Bekasi  
(Output)  
Hasil : Meningkatnya Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan  
  
Kelompok : Sekretariat DPRD  
Sasaran



Tabel 6.1.

## Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kota Bekasi Tahun 2019-2023

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp (ribuan)		
					Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Meningkatkan Kapasitas Pelayanan Sekretariat DPRD	Program Administrasi, Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	75,12	75,00	58.460.000	75,50	76.962.000	76,00	80.354.400	76,50	96.425.280	77,00	115.710.336	77,00	117.957.696	SEKRETARIAT DPRD	
			Persentase Terfasilitasinya Proses Penyusunan dan Penetapan APBD dan LAPBD		100%	21.200.000	100%	28.300.000	100%	33.960.000	100%	40.752.000	100%	48.902.400	100%	48.902.400	SEKRETARIAT DPRD	
		Kegiatan Reses DPRD Kota Bekasi	Terlaksananya Reses DPRD		3 Kali Reses	5.300.000	3 Kali Reses	6.360.000	3 Kali Reses	7.632.000	3 Kali Reses	9.158.400	3 Kali Reses	10.990.080	3 Kali Reses	10.990.080	SEKRETARIAT DPRD	
		Penyelenggaraan Kegiatan Badan Anggaran	Terselenggaranya Pembahasan LHP BPK Terselenggaranya Pembahasan LP2APBD Terselenggaranya Pembahasan KUA PPAS Murni Terselenggaranya Pembahasan KUA PPAS Perubahan Terselenggaranya Pembahasan APBD Perubahan Terselenggaranya Pembahasan APBD Murni		1 Dokumen	5.200.000	1 Dokumen	6.240.000	1 Dokumen	7.488.000	1 Dokumen	8.985.600	1 Dokumen	10.782.720	1 Dokumen	10.782.720	SEKRETARIAT DPRD	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp (ribuan)		
					Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen			
		Kegiatan Kunjungan, Rapat Kerja dan Studi Banding Komisi dan Badan Kehormatan DPRD Kota Bekasi	Terlaksananya Kegiatan Kunjungan, Rapat Kerja, dan Study Banding Komisi dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Bekasi		60.00 Rapat Kerja, 20 Perjalanan Dinas/Kunker Luar Daerah Dalam Provinsi, 10 Perjalanan Dinas/Kunker Luar Daerah Luar Provinsi (DKI Jakarta), 60 Perjalanan Dinas/Kunker Dalam Daerah/Kota, 20 Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi, dan 3 Dokumen	10.700.000	60.00 Rapat Kerja, 20 Perjalan Dinas/Kunker Luar Daerah Luar Provinsi (DKI Jakarta), 60 Perjalan Dinas/Kunker Dalam Daerah/Kota, 20 Perjalan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi, dan 3 Dokumen	15.700.000	60.00 Rapat Kerja, 20 Perjalan Dinas/Kunker Luar Daerah Luar Provinsi (DKI Jakarta), 60 Perjalan Dinas/Kunker Dalam Daerah/Kota, 20 Perjalan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi, dan 3 Dokumen	18.840.000	60.00 Rapat Kerja, 20 Perjalan Dinas/Kunker Luar Daerah Luar Provinsi (DKI Jakarta), 60 Perjalan Dinas/Kunker Dalam Daerah/Kota, 20 Perjalan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi, dan 3 Dokumen	22.608.000	60.00 Rapat Kerja, 20 Perjalan Dinas/Kunker Luar Daerah Luar Provinsi (DKI Jakarta), 60 Perjalan Dinas/Kunker Dalam Daerah/Kota, 20 Perjalan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi, dan 3 Dokumen	27.129.600	60.00 Rapat Kerja, 20 Perjalan Dinas/Kunker Luar Daerah Luar Provinsi (DKI Jakarta), 60 Perjalan Dinas/Kunker Dalam Daerah/Kota, 20 Perjalan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi, dan 3 Dokumen	27.129.600	SEKRETARIA T DPRD	
			Persentase Terfasilitasinya Proses Penyusunan dan Penetapan PERDA		100 %	17.310.000	100 %	20.772.000	100 %	24.926.400	100 %	29.911.680	100 %	35.894.016	35.894.016	SEKRETARI AT DPRD		
		Penyelenggaraan Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD Kota Bekasi	Kajian/Telaah, Makalah/Laporan Rapat-Rapat Fraksi		12 Kajian/Telaah, 12 Makalah/Laporan Rapat-Rapat Fraksi	1.600.000	12 Kajian/Telaah, 12 Makalah/Laporan Rapat-Rapat Fraksi	1.920.000	12 Kajian/Telaah, 12 Makalah/Laporan Rapat-Rapat Fraksi	2.304.000	12 Kajian/Telaah, 12 Makalah/Laporan Rapat-Rapat Fraksi	2.764.800	12 Kajian/Telaah, 12 Makalah/Laporan Rapat-Rapat Fraksi	3.317.760	12 Kajian/Telaah, 12 Makalah/Laporan Rapat-Rapat Fraksi	3.317.760	SEKRETARIA T DPRD	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp (ribuan)		
					Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pelaksanaan Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi	Sidang Persetujuan Bersama KUA/PPAS, Sidang Penetapan RAPBD, Sidang Penetapan APBD, Sidang Paripurna Penyampaian LAPBD, Sidang Paripurna LAPBD		1 Dokumen, 1 Dokumen, 1 Dokumen, 1 Dokumen	650.000	1 Dokumen, 1 Dokumen, 1 Dokumen, 1 Dokumen	780.000	1 Dokumen, 1 Dokumen, 1 Dokumen, 1 Dokumen	936.000	1 Dokumen, 1 Dokumen, 1 Dokumen, 1 Dokumen	1.123.200	1 Dokumen, 1 Dokumen, 1 Dokumen, 1 Dokumen	1.347.840	1 Dokumen, 1 Dokumen, 1 Dokumen, 1 Dokumen	1.347.840	SEKRETARIAT DPRD	
		Penyelenggaraan Pansus dan Pembahasan Raperda	Nota Kesepakatan Raperda menjadi Perda		18 Nota Kesepakatan Raperda menjadi Perda	7.500.000	18 Nota Kesepakatan Raperda menjadi Perda	9.000.000	18 Nota Kesepakatan Raperda menjadi Perda	10.800.000	18 Nota Kesepakatan Raperda menjadi Perda	12.960.000	18 Nota Kesepakatan Raperda menjadi Perda	15.552.000	18 Nota Kesepakatan Raperda menjadi Perda	15.552.000	SEKRETARIAT DPRD	
		Pengelolaan Dokumentasi Produk Hukum	Terdokumentasinya Produk Hukum		1 Dokumen	60.000	1 Dokumen	72.000	1 Dokumen	86.400	1 Dokumen	103.680	1 Dokumen	124.416	1 Dokumen	124.416	SEKRETARIAT DPRD	
		Penyelenggaraan Kegiatan Rapat Pimpinan dan Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi	Terselenggaranya :Rapat Badan Musyawarah KUA/PPAS Rapat Badan Musyawarah RAPBD Rapat Badan Musyawarah APBD Rapat Badan Musyawarah Penyampaian LPAPBD Rapat Badan Musyawarah LPAPBD		1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	3.000.000	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	3.600.000	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	4.320.000	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	5.184.000	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	6.220.800	1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen	6.220.800	SEKRETARIAT DPRD	
		Penelaahan dan Penyusunan Produk Hukum	Naskah Akademis dan Raperda Inisiatif Propem perda Naskah Akademis dan Raperda Inisiatif Kajian/ Telaahan Naskah Akademis dan Raperda Inisiatif		3 Raperda	4.500.000	3 Raperda	5.400.000	3 Raperda	6.480.000	3 Raperda	7.776.000	3 Raperda	9.331.200	3 Raperda	9.331.200	SEKRETARIAT DPRD	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp (ribuan)		
					Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
					18 Keputusan 3 Kajian/ Telaahan		18 Keputusan 3 Kajian/ Telaahan		18 Keputusan 3 Kajian/ Telaahan		18 Keputusan 3 Kajian/ Telaahan		18 Keputusan 3 Kajian/ Telaahan		18 Keputusan 3 Kajian/ Telaahan			
			Persentase Terfasilitasinya Kegiatan DPRD		100%	13.950.000	100%	20.890.000	100%	13.068.000	100%	15.681.600	100%	18.817.920		21.065.280	SEKRETARIAT DPRD	
		Penyelenggaraan Asosiasi Sekretariat DPRD Seluruh Indonesia dan Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (ASDEKSI dan ADEKSI)	Terselenggaranya ASDEKSI, Terselenggaranya ADEKSI		2 Even, 100 Orang, 48 Orang	2.800.000	2 Even, 100 Orang, 48 Orang	3.360.000	2 Even, 100 Orang, 48 Orang	4.032.000	2 Even, 100 Orang, 48 Orang	4.838.400	2 Even, 100 Orang, 48 Orang	5.806.080	2 Even, 100 Orang, 48 Orang	5.806.080	SEKRETARIAT DPRD	
		Peningkatan Kapasitas DPRD Kota Bekasi	Terlaksananya Bimtek Orientasi Pendalaman Tugas, Bimtek Lemhanas, Bimtek Partai, Medikal Check Up		50 Orang x 4 kali, 50 Orang x 4 kali, 50 Orang x 4 kali, 50 Orang x 4 kali	5.600.000	50 Orang x 4 kali, 50 Orang x 4 kali, 50 Orang x 4 kali, 50 Orang x 4 kali	6.720.000	50 Orang x 4 kali, 50 Orang x 4 kali, 50 Orang x 4 kali, 50 Orang x 4 kali	8.064.000	50 Orang x 4 kali, 50 Orang x 4 kali, 50 Orang x 4 kali, 50 Orang x 4 kali	9.676.800	50 Orang x 4 kali, 50 Orang x 4 kali, 50 Orang x 4 kali, 50 Orang x 4 kali	11.612.160	50 Orang x 4 kali, 50 Orang x 4 kali, 50 Orang x 4 kali, 50 Orang x 4 kali		SEKRETARIAT DPRD	
		Rangkaian Kegiatan HUT Kota Bekasi dan HUT RI	Terselenggaranya Rapat Paripurna Istimewa, Terlaksananya pertunjukan seni budaya, Tersedianya Pakaian Adat		2 kali, 1 kali, 170 Stel	550.000	2 kali, 1 kali, 170 Stel	660.000	2 kali, 1 kali, 170 Stel	792.000	2 kali, 1 kali, 170 Stel	950.400	2 kali, 1 kali, 170 Stel	1.140.480	2 kali, 1 kali, 170 Stel		SEKRETARIAT DPRD	
		Medical Check Up					50 Orang Anggota DPRD x 4 Kali	150.000	50 Orang Anggota DPRD x 4 Kali	180.000	50 Orang Anggota DPRD x 4 Kali	216.000	50 Orang Anggota DPRD x 4 Kali	259.200	50 Orang Anggota DPRD x 4 Kali	259.200	SEKRETARIAT DPRD	
		Renovasi Kantor DPRD Kota Bekasi	Terlaksananya Renovasi Kantor DPRD		1 Paket	5.000.000		-		-		-		-	5.000.000		di alihkan ke Dinas PERKIMTAN	
		Renovasi Masjid Al-Akhirat DPRD Kota Bekasi				-		3.000.000		-		-		-	3.000.000		di alihkan ke Dinas PERKIMTAN	
		Pembangunan Gedung D DPRD Kota				-		7.000.000		-		-		-	7.000.000		di alihkan ke Dinas PERKIMTAN	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp (ribuan)		
					Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Bekasi																
			Persentase Terfasilitasinya Informasi DPRD		100%	6.000.000	100%	7.000.000	100%	8.400.000	100%	10.080.000	100%	12.096.000		12.096.000	SEKRETARIAT DPRD	
		Pengelolaan Media Center DPRD Kota Bekasi	Kerjasama Media Cetak, Media Online, Live Event Radio Swasta, Talk Show, Pemeliharaan Jaringan, Karangan Bunga, Kerjasama Radio Swasta, Buletin Swara DPRD		15 Media Cetak 15 Media 3 Kali 10 Kali 1 Tahun 15 Buah 3 Kegiatan 10 Edisi 35 Liputan	1.000.000	15 Media Cetak 15 Media 3 Kali 10 Kali 1 Tahun 15 Buah 3 Kegiatan 10 Edisi 35 Liputan	2.000.000	15 Media Cetak 15 Media 3 Kali 10 Kali 1 Tahun 15 Buah 3 Kegiatan 10 Edisi 35 Liputan	2.400.000	15 Media Cetak 15 Media 3 Kali 10 Kali 1 Tahun 15 Buah 3 Kegiatan 10 Edisi 35 Liputan	2.880.000	15 Media Cetak 15 Media 3 Kali 10 Kali 1 Tahun 15 Buah 3 Kegiatan 10 Edisi 35 Liputan	3.456.000	15 Media Cetak 15 Media 3 Kali 10 Kali 1 Tahun 15 Buah 3 Kegiatan 10 Edisi 35 Liputan	3456000		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Per Undang-undangan terhadap masyarakat dan Aparatur OPD Terkait, Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah, Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Tentang Peraturan Daerah		1 Kali, 3100 orang	5.000.000	1 Kali, 3100 orang	5.000.000	1 Kali, 3100 orang	6.000.000	1 Kali, 3100 orang	7.200.000	1 Kali, 3100 orang	8.640.000	1 Kali, 3100 orang	8.640.000	SEKRETARIAT DPRD	
		Program Peningkatan Administrasi Perkantoran	Optimalisasi Peningkatan Administrasi Perkantoran		100%	10.731.400	100%	13.891.400	100%	16.037.680	100%	18.613.216	100%	21.703.859	100%	21.703.859	SEKRETARIAT DPRD	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp (ribuan)		
					Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya penyediaan jasa sambungan telepon, terlaksananya peny. jasa sambungan listrik, terlaksananya peny. jasa sambungan internet, terlaksananya peny. jasa sambungan TV kabel dan terlaksananya peny. jasa sambungan internet & finger print		96 line telp/bln, 48 rekening/bln, 180 titik/bln, 48 titik/bln	750.000	96 line telp/bln, 48 rekening/bln, 180 titik/bln, 48 titik/bln	750.000	96 line telp/bln, 48 rekening/bln, 180 titik/bln, 48 titik/bln, 36 titik/bln	900.000	96 line telp/bln, 48 rekening/bln, 180 titik/bln, 48 titik/bln, 36 titik/bln	1.080.000	96 line telp/bln, 48 rekening/bln, 180 titik/bln, 48 titik/bln, 36 titik/bln	1.296.000	96 line telp/bln, 48 rekening/bln, 180 titik/bln, 48 titik/bln, 36 titik/bln	1.296.000	SEKRETARIAT DPRD	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya jasa kebersihan gedung sekretariat dan humas Terlaksananya jasa kebersihan gedung paripurna Terlaksananya jasa petugas kebersihan halaman/taman gedung DPRD Terlaksananya pemeliharaan alat-alat pengolahan sampah		31.68 bulan/M2, 26.076 bulan/M2, 47.700 bulan/M2, 2 jenis pemeliharaan/tahun	950.000	31.68 bulan/M2, 26.076 bulan/M2, 47.700 bulan/M2, 2 jenis pemeliharaan/tahun	950.000	31.68 bulan/M2, 26.076 bulan/M2, 47.700 bulan/M2, 2 jenis pemeliharaan/tahun	1.140.000	31.68 bulan/M2, 26.076 bulan/M2, 47.700 bulan/M2, 2 jenis pemeliharaan/tahun	1.368.000	31.68 bulan/M2, 26.076 bulan/M2, 47.700 bulan/M2, 2 jenis pemeliharaan/tahun	1.641.600	31.68 bulan/M2, 26.076 bulan/M2, 47.700 bulan/M2, 2 jenis pemeliharaan/tahun	1.641.600	SEKRETARIAT DPRD	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor				400.000		400.000		480.000		576.000		691.200		691.200	SEKRETARIAT DPRD	
		Penyediaan Barang Cetak dan				150.000		150.000		180.000		216.000		259.200		259.200	SEKRETARIAT DPRD	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp (ribuan)		
					Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penggandaan																
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan		9 unit komponen listrik/ elektronik	50.000	9 unit komponen listrik/ elektronik	50.000	9 unit komponen listrik/ elektronik	60.000	9 unit komponen listrik/ elektronik	72.000	9 unit komponen listrik/ elektronik	86.400	9 unit komponen listrik/ elektronik	86.400	SEKRETARIAT DPRD	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			12 Bulan	400.000	12 Bulan	400.000	12 Bulan	480.000	12 Bulan	576.000	12 Bulan	691.200	12 Bulan	691.200	SEKRETARIAT DPRD	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Terlaksananya penyediaan makan minum harian pimpinan DPRD, Sekwan, Kabag dan Pegawai Terlaksananya penyediaan makan minum rapat Terlaksananya penyediaan makan minum tamu dan pengamanan		4,826 OK, mamin harian, 400 OK, mamin rapat, 8.542 OK, mamin tamu dan pengamanan	950.000	4,826 OK, mamin harian, 400 OK, mamin rapat, 8.542 OK, mamin tamu dan pengamanan	950.000	4,826 OK, mamin harian, 400 OK, mamin rapat, 8.542 OK, mamin tamu dan pengamanan	1.140.000	4,826 OK, mamin harian, 400 OK, mamin rapat, 8.542 OK, mamin tamu dan pengamanan	1.368.000	4,826 OK, mamin harian, 400 OK, mamin rapat, 8.542 OK, mamin tamu dan pengamanan	1.641.600	4,826 OK, mamin harian, 400 OK, mamin rapat, 8.542 OK, mamin tamu dan pengamanan	1.641.600	SEKRETARIAT DPRD	
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat -Rapat dan Konsultasi Luar Daerah		50 orang	1.000.000	50 orang	1.000.000	50 orang	1.200.000	50 orang	1.440.000	50 orang	1.728.000	50 orang	1.728.000	SEKRETARIAT DPRD	
		Penyedia Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran		101 Orang/12 bln	5.036.400	101 Orang/12 bln	5.036.400	101 Orang/12 bln	6.043.680	101 Orang/12 bln	7.252.416	101 Orang/12 bln	8.702.899	101 Orang/12 bln	8.702.899	SEKRETARIAT DPRD	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp (ribuan)		
					Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Terlaksananya pengamanan unsur Polisi Terlaksananya pengamanan unsur TNI Terlaksananya pengamanan unsur Satpol PP Terlaksananya unsur DISHUB Terlaksananya jasa keamanan (satuan pengamanan) gedung DPRD		420 OK, 224 OK, 280 OK, 140 OK, 12 bulan	1.000.000	420 OK, 224 OK, 280 OK, 140 OK, 12 bulan	1.000.000	420 OK, 224 OK, 280 OK, 140 OK, 12 bulan	1.200.000	420 OK, 224 OK, 280 OK, 140 OK, 12 bulan	1.440.000	420 OK, 224 OK, 280 OK, 140 OK, 12 bulan	1.728.000	420 OK, 224 OK, 280 OK, 140 OK, 12 bulan	1.728.000	SEKRETARIA T DPRD	
		Penataan Arsip			12 Bulan	45.000	12 Bulan	45.000	12 Bulan	54.000	12 Bulan	64.800	12 Bulan	77.760	12 Bulan	77.760	SEKRETARIA T DPRD	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				-	1 Paket	800.000	1 Paket	800.000	1 Paket	800.000	1 Paket	800.000	1 Paket	800.000		
		Building Management				-	1 Paket	2.300.000	1 Paket	2.300.000	1 Paket	2.300.000	1 Paket	2.300.000	1 Paket	2.300.000		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat				-	12 Bulan	60.000	12 Bulan	60.000	12 Bulan	60.000	12 Bulan	60.000	12 Bulan	60.000		
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	2.400.000	100%	2.400.000	100%	2.880.000	100%	3.456.000	100%	4.147.200	100%	4.147.200	SEKRETARIA T DPRD	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor		9 pemeliharaan, 12 bln bahan pembersih kamar mansi, 12 bln pest control, 12 bln sewa tanaman, dan 12 bln sewa pengharum ruangan	850.000	9 pemeliharaan, 12 bln bahan pembersih kamar mansi, 12 bln pest control, 12 bln sewa tanaman, dan 12 bln sewa pengharum ruangan	850.000	9 pemeliharaan, 12 bln bahan pembersih kamar mansi, 12 bln pest control, 12 bln sewa tanaman, dan 12 bln sewa pengharum ruangan	1.020.000	9 pemeliharaan, 12 bln bahan pembersih kamar mansi, 12 bln pest control, 12 bln sewa tanaman, dan 12 bln sewa pengharum ruangan	1.224.000	9 pemeliharaan, 12 bln bahan pembersih kamar mansi, 12 bln pest control, 12 bln sewa tanaman, dan 12 bln sewa pengharum ruangan	1.468.800	9 pemeliharaan, 12 bln bahan pembersih kamar mansi, 12 bln pest control, 12 bln sewa tanaman, dan 12 bln sewa pengharum ruangan	1.468.800	SEKRETARIA T DPRD	



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp (ribuan)		
					Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Terlaksananya pemeliharaan mobil jabatan		4 unit mobil, 14.344 liter	300.000	4 unit mobil, 14.344 liter	300.000	4 unit mobil, 14.344 liter	360.000	4 unit mobil, 14.344 liter	432.000	4 unit mobil, 14.344 liter	518.400	4 unit mobil, 14.344 liter	518.400	SEKRETARIA T DPRD	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pembayaran BBM, Terlaksananya pemeliharaan kendaraan operasional roda 4, bis roda 6 dan roda 2 Terlaksananya pembayaran STNK kendaraan operasional roda 4, bis roda 6 dan roda 2		12.50 liter, 108 unit/kali, 80 unit/kali, 38 unit/kali	550.000	12.50 liter, 108 unit/kali, 80 unit/kali, 38 unit/kali	550.000	12.50 liter, 108 unit/kali, 80 unit/kali, 38 unit/kali	660.000	12.50 liter, 108 unit/kali, 80 unit/kali, 38 unit/kali	792.000	12.50 liter, 108 unit/kali, 80 unit/kali, 38 unit/kali	950.400	12.50 liter, 108 unit/kali, 80 unit/kali, 38 unit/kali	950.400	SEKRETARIA T DPRD	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor		60 unit APPAR kecil, 6 unit APPAR besar, 9 jenis pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor, 1 jenis pemeliharaan alat studio/alat komunikasi, 5 jenis pemeliharaan jaringan air, 2 jenis pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	500.000	60 unit APPAR kecil, 6 unit APPAR besar, 9 jenis pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor, 1 jenis pemeliharaan alat studio/alat komunikasi, 5 jenis pemeliharaan jaringan air, 2 jenis pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	500.000	60 unit APPAR kecil, 6 unit APPAR besar, 9 jenis pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor, 1 jenis pemeliharaan alat studio/alat komunikasi, 5 jenis pemeliharaan jaringan air, 2 jenis pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	600.000	60 unit APPAR kecil, 6 unit APPAR besar, 9 jenis pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor, 1 jenis pemeliharaan alat studio/alat komunikasi, 5 jenis pemeliharaan jaringan air, 2 jenis pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	720.000	60 unit APPAR kecil, 6 unit APPAR besar, 9 jenis pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor, 1 jenis pemeliharaan alat studio/alat komunikasi, 5 jenis pemeliharaan jaringan air, 2 jenis pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	864.000	60 unit APPAR kecil, 6 unit APPAR besar, 9 jenis pemeliharaan peralatan perlengkapan kantor, 1 jenis pemeliharaan alat studio/alat komunikasi, 5 jenis pemeliharaan jaringan air, 2 jenis pemeliharaan instalasi listrik dan telepon	864.000	SEKRETARIA T DPRD	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan meubelair		200 unit/tahun	200.000	200 unit/tahun	200.000	200 unit/tahun	240.000	200 unit/tahun	288.000	200 unit/tahun	345.600	200 unit/tahun	345.600	SEKRETARIA T DPRD	
		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Disiplin Aparatur		100%	1.262.590	100%	1.262.590	100%	1.515.108	100%	1.818.130	100%	2.181.756	100%	2.181.756	SEKRETARIA T DPRD	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp (ribuan)		
					Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		100 PSH DPRD, 50 PDH DPRD, 50 PSL DPRD, 170 PDH Setwan, 50 PSR DPRD, 170 PSR Setwan	700.000	100 PSH DPRD, 50 PDH DPRD, 50 PSL DPRD, 170 PDH Setwan, 50 PSR DPRD, 170 PSR Setwan	700.000	100 PSH DPRD, 50 PDH DPRD, 50 PSL DPRD, 170 PDH Setwan, 50 PSR DPRD, 170 PSR Setwan	840.000	100 PSH DPRD, 50 PDH DPRD, 50 PSL DPRD, 170 PDH Setwan, 50 PSR DPRD, 170 PSR Setwan	1.008.000	100 PSH DPRD, 50 PDH DPRD, 50 PSL DPRD, 170 PDH Setwan, 50 PSR DPRD, 170 PSR Setwan	1.209.600	100 PSH DPRD, 50 PDH DPRD, 50 PSL DPRD, 170 PDH Setwan, 50 PSR DPRD, 170 PSR Setwan	1.209.600	SEKRETARIAT DPRD	
		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Terlaksananya pengadaan pakaian hari-hari tertentu		115 stel pakaian adat, 65 stel pakaian batik, 170 buah pakaian batik, dan 73 baju korpri	382.590	115 stel pakaian adat, 65 stel pakaian batik, 170 buah pakaian batik, dan 73 baju korpri	382.590	115 stel pakaian adat, 65 stel pakaian batik, 170 buah pakaian batik, dan 73 baju korpri	459.108	115 stel pakaian adat, 65 stel pakaian batik, 170 buah pakaian batik, dan 73 baju korpri	550.930	115 stel pakaian adat, 65 stel pakaian batik, 170 buah pakaian batik, dan 73 baju korpri	661.116	115 stel pakaian adat, 65 stel pakaian batik, 170 buah pakaian batik, dan 73 baju korpri	661.116	SEKRETARIAT DPRD	
		Pengadaan Pakaian Olah Raga	Terlaksananya pengadaan pakaian olah raga		220 stel training set olah raga, 220 buah kaos olah raga, 65 sepatu olah raga, dan 220 topi olah raga	180.000	220 stel training set olah raga, 220 buah kaos olah raga, 65 sepatu olah raga, dan 220 topi olah raga	180.000	220 stel training set olah raga, 220 buah kaos olah raga, 65 sepatu olah raga, dan 220 topi olah raga	216.000	220 stel training set olah raga, 220 buah kaos olah raga, 65 sepatu olah raga, dan 220 topi olah raga	259.200	220 stel training set olah raga, 220 buah kaos olah raga, 65 sepatu olah raga, dan 220 topi olah raga	311.040	220 stel training set olah raga, 220 buah kaos olah raga, 65 sepatu olah raga, dan 220 topi olah raga	311.040	SEKRETARIAT DPRD	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100%	650.000	100%	750.000	100%	850.000	100%	970.000	100%	1.114.000	100%	1.114.000	SEKRETARIAT DPRD	
		Pendidikan dan Pelatihan Non Formal				500.000		500.000		600.000		720.000		864.000		864.000	SEKRETARIAT DPRD	
		Penyelenggaraan Capacity Building Aparatur				150.000		250.000		250.000		250.000		250.000		250.000	SEKRETARIAT DPRD	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Optimalisasi Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100%	680.000	100%	880.000	100%	1.056.000	100%	1.267.200	100%	1.520.640	100%	1.520.640	SEKRETARIAT DPRD	

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
					2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp (ribuan)		
					Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)	Target	Rp (ribuan)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP)		1 Dokumen	40.000	1 Dokumen	40.000	1 Dokumen	48.000	1 Dokumen	57.600	1 Dokumen	69.120	1 Dokumen	69.120	SEKRETARIAT DPRD	
		Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya Laporan Bulanan, Laporan Semesteran, Laporan Akhir Tahun dan Laporan CaLK		72 Laporan Bulanan, 5 Laporan Semesteran, 4 Laporan Akhir Tahun, 10 Laporan CaLK	40.000	72 Laporan Bulanan, 5 Laporan Semesteran, 4 Laporan Akhir Tahun, 10 Laporan CaLK	40.000	72 Laporan Bulanan, 5 Laporan Semesteran, 4 Laporan Akhir Tahun, 10 Laporan CaLK	48.000	72 Laporan Bulanan, 5 Laporan Semesteran, 4 Laporan Akhir Tahun, 10 Laporan CaLK	57.600	72 Laporan Bulanan, 5 Laporan Semesteran, 4 Laporan Akhir Tahun, 10 Laporan CaLK	69.120	72 Laporan Bulanan, 5 Laporan Semesteran, 4 Laporan Akhir Tahun, 10 Laporan CaLK	69.120	SEKRETARIAT DPRD	
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja	Renstra 2018-20231, Renja 2020 Sekretariat DPRD Kota Bekasi, Laporan Agenda Kerja DPRD Kota Bekasi		1 Dokumen, 1 Dokumen, 1 Dokumen	600.000	1 Dokumen, 1 Dokumen, 1 Dokumen	800.000	1 Dokumen, 1 Dokumen, 1 Dokumen	960.000	1 Dokumen, 1 Dokumen, 1 Dokumen	1.152.000	1 Dokumen, 1 Dokumen, 1 Dokumen	1.382.400	1 Dokumen, 1 Dokumen, 1 Dokumen	1.382.400	SEKRETARIAT DPRD	
JUMLAH						74.183.990		96.145.990		102.693.188		122.549.826		146.377.791		148.625.151		

## BAB VII

### Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang tertuang dalam Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dirancang untuk ikut memberi kontribusi terhadap pencapaian terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023, Indikator tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD (2018)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD (2023)
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Nilai Hasil Pencapaian IKK dalam EKPPD	3.184	3.219	3.254	3.290	3.325	3.360	3.360
2	Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	75,12	75	75,50	76	76,50	77	77

Indikator kinerja Sekretariat DPRD Kota Bekasi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yaitu Indeks Kepuasan DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD sedangkan di dalam RPJMD indikator yang mengacu pada tujuan dan sasaran adalah Nilai Hasil Pencapaian IKK dalam EKPPD. Setwan akan berkontribusi terhadap pencapaian indikator sasaran RPJMD melalui program dan kegiatan :

I	Program Administrasi, Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
1	<i>Kegiatan Reses DPRD Kota Bekasi</i>
2	<i>Penyelenggaraan Kegiatan Badan Anggaran</i>
3	<i>Kunjungan, Rapat Kerja dan Studi Banding Komisi dan Badan Kehormatan DPRD Kota Bekasi</i>
4	<i>Penyelenggaraan Kelompok Pakar/Tim Ahli DPRD Kota Bekasi</i>
5	<i>Pelaksanaan Rapat-Rapat Paripurna DPRD Kota Bekasi</i>
6	<i>Penyelenggaraan Pansus dan Pembahasan Raperda</i>
7	<i>Pengelolaan Dokumentasi Produk Hukum</i>
8	<i>Penyelenggaraan Kegiatan Rapat Pimpinan dan Badan Musyawarah DPRD Kota Bekasi</i>
9	<i>Penelaahan dan Penyusunan Produk Hukum</i>
10	<i>Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>
11	<i>Penyelenggaraan Asosiasi Sekretariat DPRD Seluruh Indonesia dan Asosiasi DPRD Seluruh Indonesia (ASDEKSI dan ADEKSI)</i>
12	<i>Peningkatan Kapasitas DPRD Kota Bekasi</i>

	13	<i>Rangkaian Kegiatan HUT Kota Bekasi dan HUT RI</i>
	14	<i>Medical Check Up</i>
	15	<i>Pengelolaan Media Center DPRD Kota Bekasi</i>
<b>II</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	
	1	<i>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</i>
	2	<i>Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor</i>
	3	<i>Penyediaan Alat Tulis Kantor</i>
	4	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>
	5	<i>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>
	6	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>
	7	<i>Penyediaan Makanan dan Minuman</i>
	8	<i>Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah</i>
	9	<i>Penyedia Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran</i>
	10	<i>Penyediaan Jasa Keamanan Kantor</i>
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	
	1	<i>Pengadaan Peralatan Gedung Kantor</i>
	2	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan</i>
	3	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional</i>
	4	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor</i>
	5	<i>Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur</i>
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	
	1	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya</i>
	2	<i>Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu</i>
	3	<i>Pengadaan Pakaian Olah Raga</i>
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	
	1	<i>Pendidikan dan Pelatihan Non Formal</i>
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	
	1	<i>Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>
	2	<i>Penyusunan Laporan Keuangan</i>
	3	<i>Penyusunan dan Evaluasi Rencana Kerja</i>

Selama lima tahun periode 2018-2023 target yang ditetapkan seperti pada tabel 7.1 diatas.

#### 7.1. Kaidah Pelaksanaan Umum

**R**encana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Kota Bekasi merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMD yang bersifat indikatif, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk rentang waktu 5 (lima) tahunan dari tahun 2018-2023 serta sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

Sehubungan dengan implementasi Renstra Sekretariat DPRD Kota Bekasi pada tahun 2018-2023, maka perlu untuk memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan diantaranya sebagai berikut :

1. Sekretariat DPRD berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra yang diselaraskan dengan dokumen RPJMD Kota Bekasi.
2. Sekretariat DPRD berkewajiban menyusun Renja Sekretariat DPRD Kota Bekasi setiap tahun dengan berpedoman pada Dokumen Rentra Sekretariat DPRD dan RKPD Kota Bekasi.
3. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Renstra, Sekretariat DPRD Kota Bekasi berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan baik lima tahunan maupun secara berkala setiap tahunnya.
4. Meskipun pada prinsipnya dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, namun dikarenakan juga memuat program dan kegiatan masa transisi I (satu) tahun, maka dalam pelaksanaannya berlaku selama 6 (enam) tahun.

#### 7.2. Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya terkait dengan visi, misi, kebijakan dan program yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Kota Bekasi pada Renstra 2018-2023, antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sekretariat DPRD Kota Bekasi.
2. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai.
3. Penyediaan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan dengan sistem dan prosedur yang memadai.
4. Meningkatkan kualitas staf pendamping pada Alat Kelengkapan Dewan dan pelaksanaan rapat-rapat, Hearing/Dialog dengan Pemda dan masyarakat.
5. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD melalui bintek dan kunker.

6. Dukungan ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bekasi
7. Pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bekasi secara tanggap, tepat dan professional.

Pada pelaksanaannya diharapkan dokumen perencanaan Strategis Sekretariat DPRD Kota Bekasi periode 2018-2023 dapat mendukung dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kota Bekasi selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga dapat tercapai visi yang telah ditetapkan.

Bekasi,  
**Sekretaris DPRD Kota Bekasi**

**Dr. H. MOH. RIDWAN, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620103 198503 1 010